

Faktor yang Mendorong Indonesia Melakukan Kerjasama Bilateral *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* pada tahun 2007

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Peminatan *Global Political Economy*



Guntara Adityo Kurniawan

155120407111008

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR YANG MENDORONG INDONESIA MELAKUKAN
KERJASAMA BILATERAL *INDONESIA-JAPAN ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* PADA TAHUN 2007

SKRIPSI

Disusun oleh :

Guntara Adityo Kurniawan

155120407111008

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian skripsi
pada tanggal 16 Oktober 2019

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Primadiana Yunita, S.IP, MA

Achmad Fathoni K, S.IP, MA

NIP.199006202019032023

NIK.2009068201231001

Anggota Majelis Penguji I

Anggota Majelis Penguji II

Lia Nihlah Najwah, S.IP, M.Si

Reza Triarda, S.Sos, MA

NIK.2009068305212001

NIP. 198902132019031007

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Lurgdo, SE, M.Si., AK

NIP.196908141994021001



LEMBAR PERSETUJUAN

FAKTOR YANG MENDORONG INDONESIA MELAKUKAN
KERJASAMA BILATERAL *INDONESIA-JAPAN ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)* PADA TAHUN 2007

SKRIPSI

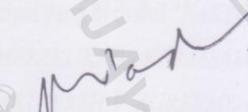
Disusun oleh :

Guntara Adityo Kurniawan (155120407111008)

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Lia Nihlah Najwah, S.IP, M.Si
NIK. 2009068305212001

Reza Triarda, S.Sos, MA
NIP. 198902132019031007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Amyanto Azis, S.IP., M.DevSt.

NIP. 19780220201021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guntara Adityo Kurniawan

NIM : 155120407111008

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "*FAKTOR YANG MENDORONG INDONESIA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA BILATERAL INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) PADA TAHUN 2007*" merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya, ditulis secara paraphrase dengan didukung oleh kutipan langsung atas catatan kaki yang disertakan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya dapat dari skripsi ini.

Malang, 25 Oktober 2019



6000
ENAM RIBURUPAH

Guntara Adityo Kurniawan

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kasih sayang-Nya terhadap penulis dan tidak pernah membiarkan penulis untuk berjuang sendirian.
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan saya selalu, dan mendukung saya dalam berbagai situasi. Serta kedua kakak saya yang memberikan nasehat dan percontohan untuk penulis.
3. Ibu Lia Nihlah Najwah dan Bapak Reza Triarda, terima kasih sudah menjadi pembimbing skripsi terbaik yang selalu sabar dan memberi arahan kepada penulis dan memberikan dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Fahmi, Brian, Yoga, Manggala, Fakhri, yang menjadi teman terdekat penulis sejak hari pertama kuliah hingga hari terakhir. Thank you for being awesome friends.
5. Fatia, Charisa, Sri Hijrana, Afiya Selly, Ola, Naufal, Tri Adinda yang merupakan kerabat penulis dalam berdiskusi, berkeluh kesah dan bertukar pikiran selama mengerjakan skripsi.
6. Rifqi, Ekky, Ronny, Tile, Iqbal yang sudah menemani penulis dalam menjalani hidup bersama dalam satu rumah selama kuliah 4 tahun terakhir ini.
7. Achi, Regita, Aldina, dan Helga teman karib saya sejak SMA yang berkuliah di Malang yang sudah memberikan semangat dan doa untuk penulis.
8. Teman-teman BEM FISIP UB 2017 dan HI UB 2015 terima kasih atas kenangan dan kerjasamanya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Analisis Faktor yang Mendorong Indonesia dalam Melakukan Kerjasama Bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tahun 2007*” ini dengan baik dan tepat waktu demi memenuhi persyaratan pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dalam penyelesaian penelitian ini, banyak hambatan dan kesulitan yang harus dihadapi penulis, namun dengan demikian penulis dapat menemukan dan mempelajari informasi serta wawasan yang baru sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis persembahkan kepada Ibu Lia Nihlah Najwah dan Bapak Reza Triarda selaku dosen pembimbing dan dosen-dosen lainnya yang senantiasa membimbing saya dengan baik untuk menyelesaikan penelitian ini. Serta untuk rekan-rekan saya yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun untuk penyelesaian penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi orang lain yang membuka wawasannya tentang kerjasama bilateral, serta informasi dan pengetahuan tentang hubungan perekonomian dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Masih banyak kekurangan pada penelitian ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca maupun dosen sangat penulis harapkan.

Malang, 25 Oktober 2019

Penulis

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri dalam persaingan global setiap negara selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan mitra kerjasama bilateral untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan negaranya. Oleh karena itu Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia Pasifik menawarkan kerjasama bernama *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) demi meningkatkan investasi dan pembangunan. Jepang dan Indonesia bukanlah kedua negara dengan kekuatan ekonomi yang seimbang oleh karena itu tentunya butuh penyesuaian. Dari sinilah berbagai faktor pendorong Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang ingin diteliti penulis. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yakni faktor general dan faktor spesifik. Penulis juga ingin mengetahui berbagai trend *Bilateral Trade Agreement* (BTA) yang telah berjalan di beberapa negara, dan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Peneliti meneliti fenomena tersebut dengan teori BTA milik Jayant Menont.

Kata kunci : Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, Bilateral Trade Agreement, faktor general, faktor spesifik, kerjasama, investasi

ABSTRACT

It's undeniably that every country has always been trying to meet the needs of its people in such a global competition. Indonesia as a developing country needs a bilateral cooperation partners to improve the welfare and needs of the country. Therefore Japan as one of the developed countries in the Asia Pacific has offered a partnership called the Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) in order to increase investment and development. Neither Japan nor Indonesia are countries with a balanced economic power, therefore this certainly needs adjustments. In this case the author wants to examine some various factors that have been encouraged Indonesia to cooperate with Japan. Its factor is divided into two, that is general factors and specific factors. The author also wants to know the various Bilateral Trade Agreement (BTA) trends that have been running in several countries., as well as bilateral relations between Indonesia and Japan. The author used Jayant Menont's BTA theory for examined this phenomenon.

Keywords : : *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, Bilateral Trade Agreement, general factor, specific factor, cooperation, investments*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Akademis	8
BAB 2	9
KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Studi Terdahulu	9
2.2 Kerangka Konseptual	13
2.2.1. Kerjasama Bilateral.....	13
2.2.2 <i>Bilateral Trade Agreement</i>	14
2.3 Operasionalisasi Konsep	17
2.4 Alur Pemikiran	19
2.5 Hipotesis.....	20
BAB 3	21
METODE PENELITIAN.....	21



3.1	Jenis Penelitian.....	21
3.2	Ruang Lingkup Penelitian.....	21
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4	Teknik Analisa Data.....	22
3.5	Sistematika Penulisan.....	24
BAB 4		26
GAMBARAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA JEPANG DAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT.....		
4.1	Dinamika Hubungan Bilateral Jepang-Indonesia.....	26
4.2	Jenis Mitra Bilateral Trade Agreement Indonesia.....	32
4.3	Tinjauan Tentang IJEPA	37
4.4	Munculnya Trend Bilateral Trade Agreement (BTA) dan Perkembangannya	56
BAB 5		63
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA IJEPA		
5.1	<i>General Factor</i>	63
5.1.1	Kekecewaan Terhadap Institusi Multilateral	63
5.1.2	<i>Domino Effect</i>	70
5.1.3	BTA Cenderung Tidak Terlalu Menarik Perhatian Publik	73
5.1.4	Motif Politik.....	79
5.2	<i>Specific Factor</i>	83
5.2.1	Faktor Ekonomi.....	83
5.2.2	Faktor Strategis	92
5.2.3	<i>Event Driven Factor</i>	94
BAB 6		96
PENUTUP.....		
6.1	Kesimpulan.....	96
6.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Bagan specific factors yang mendorong terbentuknya BTA 19

Gambar 4.1 Neraca Perdagangan Indonesia dan Jepang Periode 2014-2019 42



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep <i>Bilateral Trade Agreement</i>	17
Tabel 4.1 Catatan-Catatan Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Indonesia Jepang.....	49
Tabel 5.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2004-2008	85
Tabel 5.2 Pertumbuhan Nilai Ekspor Dan Pertumbuhan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia Tahun 2004-2008	86
Tabel 5.3 Peranan Ekspor Non Migas Terhadap Ekspor Ekspor Total Tahun 2004-2009.....	88
Tabel 5.4 Pangsa Pasar Ekspor Non Migas di Pasar Ekspor Tradisional dan Non Tradisional Tahun 2004-2009	88

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AFTA	: <i>ASEAN Free Trade Agreement</i>



APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
APTA	: <i>Asia-Pacific Trade Agreement</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BTA	: <i>Bilateral Trade Agreement</i>
CEFTA	: <i>Central European Free Trade Agreement</i>
DAC	: <i>Development Assistance Committee</i>
DMT	: <i>Delimitation Maritime Treaty</i>
EU	: <i>European Union</i>
EPA	: <i>Economic Partnership Agreement</i>
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GAFTA	: <i>Greater Arab Free Trade Area</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
HAKI	: <i>Hak Atas Kekayaan Intelektual</i>
IJEPA	: <i>Indonesia Japan Economic Partnership Agreement</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
KTM	: <i>Konferensi Tingkat Menteri</i>
MPA	: <i>Metropolitan Priority Area</i>
NAFTA	: <i>North America Free Trade Agreement</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
PTA	: <i>Plurilateral Trade Agreement</i>
SADC	: <i>Southern African Development Community</i>
SSM	: <i>Special Safeguard Mechanism</i>

TTP : *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership*
WTO : *World Trade Organization*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa satu negara akan mengalami suatu ketergantungan yang luar biasa terhadap negara lainnya di abad 21 ini. Setiap negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem perekonomiannya dengan memproduksi suatu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat negaranya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap warganya, maka setiap negara tersebut harus melakukan sebuah kerjasama dengan negara lain yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tersebut. Dengan kata lain, bahwa satu negara tidak dapat berdiri sendiri.

Misalnya, dalam lingkup negara Indonesia sendiri yang berada di lingkungan kita. Tidak semua barang dan tidak semua kebutuhan masyarakat Indonesia dapat diproduksi dan dapat dipenuhi oleh Indonesia sendiri sehingga harus meminta bantuan kepada negara lainnya yang mampu membuat suatu produk dalam industrinya untuk kebutuhan di Indonesia. Seperti contohnya barang-barang elektronik yang berasal dari Jepang, namun rempah-rempah yang berasal dari Indonesia juga di ekspor ke negara-negara Eropa.

Fenomena *Bilateral Trade Agreement* (BTA) sendiri menjadi menarik karena mekanisme ini lebih menjanjikan dibandingkan negosiasi perdagangan

bebas tingkat multilateral misalnya melalui WTO. Negoisasi bilateral antar negara dapat dicapai dengan mudah karena hanya kepentingan dua negara saja yang akan diakomodasi.¹

Indonesia merespon perdagangan bebas ini dengan agenda permintaan negoisasi yang diajukan oleh negara Jepang yang saat itu diajukan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe kepada Presiden Megawati. Jepang mengemukakan bahwa perjanjian tersebut berbentuk Perjanjian Kerjasama Ekonomi (*Economic Partnership Agreement*).

Economic Partnership Agreement (EPA) adalah sebuah kerangka kerjasama ekonomi yang berbasis pada konsep *Free Trade Agreement*, dimana FTA ini memiliki pengertian sebuah kerjasama antara dua Negara bahkan dapat melebihi dua negara yang melakukan perjanjian internasional bagi penghapusan tarif yang dibebankan di antara Negara yang bersangkutan sekaligus untuk menghapus peraturan dalam bidang penanaman modal asing pada bidang jasa perdagangan.²

EPA memiliki cakupan yang lebih luas daripada FTA dan bersifat komprehensif karena mencakup dua isu utama, yakni:³

1. Isu tradisional FTA yang membahas tentang liberalisasi perdagangan atau produk barang dan jasa.

¹ Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA)", MOFA Japan,

² Bagaimana menikmati Preferensi Tarif melalui FTA-EPA? (Saat Mengimpor dari Jepang <http://www.jetro.go.jp/Indonesia/jiepa/index.html/BrosurEPAind2009.pdf>, diakses pada tanggal 31 April 2019

³ Syamsul Hadi dan Shamti Darmastuti, 2009. *Dominasi Modal Jepang di Indonesia Telaah Kritis atas Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Indonesia-Jepang* (Jakarta: Institute for Global Justice), Hal: 2

2. *World Trade Organization-Plus* atau bisa disebut WTO-plus yang terdiri dari isu Singapura dan isu lainnya yang mencakup kerjasama di berbagai bidang.

Yang dimaksudkan WTO-plus disini adalah kegiatan organisasi perekonomian internasional yang telah membahas isu-isu baru. Yakni membahas mengenai investasi, penanaman modal, pendirian perusahaan, dan bidang-bidang lainnya yang dimana hal ini tidak ada di WTO.

Dalam perjanjian IJEPA memiliki 3 pilar atau dapat dikatakan 3 dasar pokok yang menjadi landasan bagi kedua negara yang melakukan perjanjian untuk mengimplementasikan perjanjian ekonomi ini. Yang pertama yaitu liberalisasi perdagangan, dengan adanya liberalisasi perdagangan Jepang sepakat untuk menurunkan pos tarifnya sebesar 90% dari total 9.262 pos tarif, sedangkan Indonesia sepakat untuk membuka pos tarif sebesar 92,5% dari total 11.163. yang kedua yaitu fasilitasi perdagangan.

Fasilitas penghapusan bea masuk impor barang-barang modal yang tidak dapat diproduksi di Indonesia dalam sektor industri penggerak yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada negara Jepang seperti pada industri kendaraan bermotor dan komponennya, kemudian ada industri elektrik dan elektronik, industri alat berat kemudian mesin konstruksi, serta peralatan energi. Kemudian yang ketiga, yaitu *Capacity Building*. Dalam hal ini adanya transfer teknologi dan pengetahuan dari Pemerintah Jepang sebagai imbal balik guna meningkatkan kinerja perindustrian di Indonesia agar dapat

menghasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi.⁴

Perjanjian IJEPA ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara Jepang dan Indonesia tentunya dalam bidang perdagangan dan investasi luar negeri. Perjanjian ini juga mencakup suatu hal yang luas dengan target mempererat kerjasama ekonomi antar dua negara. Dalam hal kerjasama tersebut juga termasuk kerjasama mengenai *capacity building*, liberalisasi perdagangan, dan peningkatan perdagangan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, investasi yang ditujukan untuk meningkatkan arus barang pada lintas batas, jasa dan investasi, kemudian termasuk pula pergerakan tenaga kerja diantara Indonesia dan Jepang.⁵

Pada zaman pemerintahan Presiden Megawati, Indonesia bisa membangun stabilitas makroekonomi yang antara lain karena terdapat pengembangan kelembagaan, independensi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan moneter, serta penataan disiplin fiskal. Namun, pada saat yang sama pula Indonesia tidak dapat menyelenggarakan reformasi mikro yang dijabarkan *White Paper*, terutama dalam hal perbaikan iklim investasi yang ditandai dengan Investasi Asing Langsung yang tercatat negatif sepanjang semester pertama pada tahun 2004.⁶

Kemudian pada tahun 2005, Indonesia mengalami defisit infrastruktur selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah

⁴ Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti, 2009, *Dominasi Modal Jepang di Indonesia Telaah Kritis atas Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Indonesia-Jepang*, Jakarta: Institute for Global Justice, hlm. 2

⁵ *Ibid.*, hlm. 8

⁶ Haryo Aswicahyo & David Christian, *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*, Agustus 2017, CSIS, hlm 5

menyelenggarakan *Infrastructure Summit* pada Januari 2005 untuk menarik partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur. Namun demikian, usaha ini kurang berhasil karena kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi dan menghasilkan regulasi yang diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi infrastruktur. Salah satu kemunduran tersebut adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2004 untuk membatalkan UU Kelistrikan yang baru, yang berusaha untuk membuka persaingan dengan swasta di sektor tersebut.⁷

Dua kebijakan yang memperburuk iklim investasi pada periode ini adalah: Pertama, lambatnya usaha privatisasi oleh karena sikap pemerintah yang ambivalen terhadap konsep privatisasi. Kedua, dibatalkannya UU Kelistrikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2003 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Padahal, UU tersebut dirancang untuk meningkatkan partisipasi swasta melalui *unbundling* di sektor kelistrikan, yang jika terjadi akan menurunkan biaya listrik bagi konsumen dan sangat mendukung dunia usaha.⁸

Selain itu, Salah satu fitur dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2004 adalah mulai meningkatnya peran sektor jasa, dan melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur. Beberapa hal menjadi faktor penyebab hal tersebut, antara lain iklim kebijakan domestik yang kurang baik, ditandai oleh biaya logistik yang tinggi, iklim investasi yang kurang kondusif bagi investor asing, serta biaya tenaga kerja yang tidak kompetitif. Penanganan isu-isu di

⁷ Ibid. Hlm 6

⁸ Ibid.

atas melalui reformasi ekonomi yang ekstensif di tingkat mikro menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa ini tidak stabil.⁹

Untuk mendukung iklim investasi asing tersebut, peningkatan arus perdagangan harus diupayakan oleh Indonesia untuk menyokong perindustrian yang baik. Dengan tujuan tersebut Indonesia berupaya untuk meningkatkan arus perdagangan dengan negara Jepang dengan melakukan IJEPA yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA). Akan tetapi, harus disadari bahwa Indonesia dan Jepang bukanlah kedua negara dengan ekonomi seimbang. Dengan segala perbedaannya Indonesia harus bisa mengatasi strategi perdagangan negara Jepang. Mungkin untuk beberapa waktu bisa saja memberikan manfaat dan bisa memberikan keuntungan yang maksimal, namun bisa saja hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman untuk keberlanjutan kerjasama dalam waktu yang panjang.

Di sisi lain, negara Jepang sendiri selama tahun 2000 hingga 2003 akibat krisis global yang melanda sebagian besar negara maju, telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang. Dari data Japan Custom tercatat impor Jepang dari dunia mengalami penurunan dari US\$ 379.544,09 juta pada tahun 2000 menjadi US\$ 349.234,87 juta pada tahun 2001 dan menjadi US\$ 337.567,96 juta pada tahun 2002. Sehingga pada tahun 2003, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, pada pidatonya di depan anggota Dewan (*Lower House*) tanggal 31 Januari 2003 akan mereformasi bidang moneter seperti fiskal, perpajakan, sistem keuangan dan perbankan. Pertumbuhan Jepang

⁹ Ibid. Hlm. 7

hanya diproyeksikan tumbuh hanya sekitar 0% s/d 1% pada tahun 2003/2004.¹⁰

Jepang merupakan satu diantara Negara maju dengan nilai impor dunia yang selama 5 tahun terakhir (1998-2003) memiliki rata-rata 331,944,12 juta/tahun, namun pasar Jepang memiliki karakter yang khas dan relative tidak sama dengan ekspor ke negara maju atau bahkan ke negara berkembang lainnya. Sehingga seringkali dirasakan sebagai pengusaha eksportir Indonesia untuk memasuki pasar Jepang. Hambatan-hambatan yang dimaksud terutama dialami oleh kelompok Usaha Kecil dan Menengah.¹¹

Pada setiap negara yang melakukan kerjasama pasti ada kelebihan dan kekurangan dalam memproduksi suatu barang agar menjadi lebih baik. Alasan mengapa suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain untuk dapat meningkatkan kualitas negaranya baik secara sistem maupun secara nilai. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor yang menyebabkan negara-negara saling berlomba untuk melakukan kerjasama bilateral untuk mencapai keuntungan yang mengangkat perekonomian negara masing-masing.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mendorong Indonesia Melakukan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Tahun 2007*”

¹⁰Husin Bagis, Mengenal Pasar Jepang, 2003 diakses di <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/peluang-pasar-jepang-id0-1354945395.pdf>

¹¹ Ibid.

¹² Susana Puspa Dewi, ”*Kerjasama IJEPA Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Perdagangan Indonesia-Jepang*”, skripsi FISIP HI Unpas, 2013, hal 2-3.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yaitu, “Apa faktor-faktor yang mendorong Indonesia melakukan kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* tahun 2007?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu, “Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Indonesia melakukan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* tahun 2007.”

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengembangan mata kuliah Hubungan Internasional pada umumnya, khususnya mengenai faktor-faktor yang mendorong Indonesia dalam *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* tahun 2007.

1.4.2. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional sebagai pelatihan keterampilan penulis untuk membuat suatu penelitian serta memperoleh pengetahuan mengenai pokok permasalahan.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Terdahulu

Pada setiap penelitian pastilah tidak terlepas dari studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian agar tidak keluar jalur dari apa yang seharusnya dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, agar peneliti mendapat gambaran mengenai batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan juga harus yang mendukung mengenai penelitian dalam pengaruh IJEPA dalam industri manufaktur Indonesia Tahun 2010-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Syntia Devi Larasati¹³ dengan Judul *Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang Dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (Studi Kasus Evaluasi Kebijakan Terhadap Eksploitasi Ikan Tuna di Wilayah Perairan Indonesia)* pada tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui evaluasi penerapan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* terkait eksploitasi ikan tuna di wilayah perairan Indonesia serta dampaknya terhadap hubungan

¹³ Syntia Devi Larasati, *Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap Evaluasi Kebijakan Terhadap Eksploitasi Ikan Tuna di Perairan Indonesia*, *Journal of International*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 70-78 diunggah di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>

Indonesia dan Jepang. Kemudian, dalam penelitian tersebut menggunakan teori *greenpolitics*, yang membicarakan tentang hubungan ekonomi, politik, dan sosial suatu negara yang memberikan dampak terhadap lingkungan.

Kesimpulan pada penelitian tersebut ialah Indonesia belum memiliki target yang jelas untuk masalah perikanan sehingga eksploitasi tetap berjalan. Masalah-masalah tersebut timbul akibat pengimplementasian IJEPA membuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang sedikit mengalami fluktuasi. Namun, Indonesia masih dapat mengatasinya karena Indonesia menerapkan *soft diplomacy*.

Kedua negara yang memiliki kepentingan masing-masing cukup egois untuk mencapai target masing-masing. Sehingga kerjasama yang seharusnya berjalan saling menguntungkan justru mengalami kebalikannya. Tujuan perjanjian tersebut adalah untuk meningkatkan akses pasar, mengamankan ataupun menumbuhkan investasi, dan memperkuat kekuatan ekonomi negara sendiri.

Menurut penulis, penelitian bisa menjadi referensi penulis untuk lebih memahami efek perjanjian IJEPA di Indonesia meskipun dalam hal ini berbeda sektor yang diteliti. Jika dalam sektor perikanan terjadi ketimpangan maka dapat dianalisa pula alasan yang menyebabkan IJEPA tidak dapat berjalan efektif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tulisan milik Syntia Devi Larasati fokus terhadap perikanan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap industri manufaktur yang menjadi bagian dari perjanjian kerjasama tersebut.

Penelitian selanjutnya oleh Fithra Faisal Hastiadi¹⁴ dengan judul Analisis Dampak *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* terhadap *Price-Cost Margins* Industri Manufaktur Indonesia memiliki tujuan untuk menganalisis dampak implementasi IJEPA terhadap tingkat kompetisi industri manufaktur Indonesia.

Di dalam penelitian tersebut telah dijelaskan bahwa di Indonesia sektor yang mendapat perhatian lebih adalah industri manufaktur. Dengan berbagai fasilitas yang ada dalam perjanjian kerjasama untuk peningkatan ekonomi tersebut agar dapat diimplementasikan dengan tujuan agar industri manufaktur Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan menghasilkan produk dengan nilai jual yang cukup tinggi dan tidak kalah saing dengan negara lainnya.

Untuk meningkatkan perkembangan industri manufaktur tersebut diharapkan dari implementasi IJEPA, dan untuk meningkatkan kompetisi industri manufaktur Indonesia yang digambarkan oleh turunnya PCM. PCM industri manufaktur dapat dikatakan masih tinggi jika dibanding beberapa sektor lainnya seperti industri mesin, industri perlengkapan, industri barang galian selain logam tentunya dan industri alat lainnya. Dan juga industri kendaraan bermotor.¹⁵

Industri manufaktur Indonesia memiliki skala yang bervariasi.

Karakteristik industrinya pun masih cenderung padat karya (*labor*

¹⁴ Fithra Faisal Hastiadi, *Impact Analysis of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement to Price-Cost Margins Indonesia's Manufacture Industry*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 15, No. 2 Januari 2015, Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 8

intensive). Hadirnya IJEPA diharapkan mampu meningkatkan skala ekonomi industri sehingga biaya produksi per unitnya menjadi semakin rendah dan harga yang ditetapkan bisa lebih kompetitif. Penggunaan bahan baku yang efisien mampu mendorong penetapan harga produk industri, hal ini masih menjadi kendala dikarenakan penurunan biaya produksi tidak serta merta diikuti dengan penurunan harga secara signifikan. Industri masih menikmati keuntungan monopolis. Permintaan industri manufaktur Indonesia sempat menurun pada 2009 akibat adanya krisis ekonomi global pada 2008. Setelah itu, cenderung meningkat.

Penulis juga menggunakan penelitian milik Thomas Walmsley dan Ken Itakura. Penelitian mereka membahas tentang dampak kerjasama bilateral antara Jepang dan Singapura, dimana terdapat peningkatan investasi di Singapura baik dari domestic maupun luar negeri. Selain itu, juga terdapat keseimbangan perdagangan antar kedua negara tersebut.¹⁶

Selain itu, penulis menggunakan penelitian Betha Landes mengenai Manfaat *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* (Studi Ekspor Non-Migas Indonesia ke Jepang), yang mana membahas mengenai manfaat yang bisa diperoleh Indonesia seperti peningkatan investasi dari Jepang dan peningkatan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sektor-sektor tertentu. Tidak hanya itu, melihat dari judul penelitian Betha landes, Indonesia juga berkesempatan melakukan ekspor non-migas ke Jepang dimana sumber daya ini sangat

¹⁶ T.,Walmsley and K. Itakura, 2001, *Dynamic effects of the "New Age" Free Trade Agreement between Japan and Singapore*, Vol. 16, No. 4, Journal of Economic Integration, Sejong University.

dibutuhkan Jepang. Melalui objek yang berbeda dengan Betha tersebut, maka penelitian ini berusaha membahas lebih spesifik tentang dampak *Kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* terhadap industri manufaktur di Indonesia.¹⁷

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Kerjasama Bilateral

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Menurut Kalevi Jaakko dalam Holsti kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Kemudian, dapat dikatakan juga bahwa Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu

¹⁷ Betha Landes K.S., *Manfaat Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) (Manfaat Ekspor Komoditi Non-Migas Indonesia ke Jepang)*, Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.¹⁸

Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita berpendapat bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.¹⁹

2.2.2. *Bilateral Trade Agreement*

Definisi bilateral *free trade agreement* menurut Jayant Menon adalah perjanjian perdagangan yang disepakati oleh dua negara anggota, atau antara satu negara dengan satu *plurilateral trade agreement* (PTA), atau antara satu BTA dengan satu PTA, atau antara dua BTA atau antara dua PTA. Selain itu, terdapat tiga entitas lain yang termasuk dalam keanggotaan WTO juga dapat melakukan BTA meskipun bukan negara merdeka yaitu *the European communities*, Macau, dan Hongkong. BTA

¹⁸ Holsti, K., 1988, *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisa*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga

¹⁹ Kartasasmita Ginanjar, 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM, hlm. 17

umumnya berbentuk *free trade agreement* (FTA), BTA dapat juga berbentuk *custom union* atau *services agreement*.²⁰

Untuk mendapatkan gambaran mengenai alasan yang mendasari pembentukan perjanjian kerjasama perdagangan bebas yang dilakukan oleh Australia maka penulis akan mencoba melihatnya menggunakan konsep *bilateral trade agreement*. Konsep ini dituliskan oleh Jayant Menon pada tahun 2007 dalam sebuah jurnal revisi yang digunakan sebagai bahan diskusi Asian development bank institute.

Adapun faktor pendorong BTA menurut Jayant Menon yaitu :

a. Faktor General

1. Adanya kekecewaan terhadap gagalnya sistem liberalisasi perdagangan yang dilakukan institusi tertentu pada level multilateral.
2. *domino effect*, yaitu mulai menjamurnya BTA di kawasan asia pasifik, sehingga negara-negara lain akhirnya merasa perlu untuk memulai membuat BTA. Banyak negara yang menganggap jika tidak mengikuti trend BTA, mereka akan mengalami kerugian
3. lemahnya perhatian serta pengawasan yang dilakukan oleh media, kelompok industri, maupun golongan anti free trade sehingga menyebabkan tekanan yang sangat lemah untuk menentang terjadinya BTA's sehingga BTA mudah untuk disetujui

²⁰ Menon, Jayant. 2007. *Bilateral trade agreement. Journal compilation 2007 Crawford School of Economics and Government*, the Astralian national University and Blackwell Publishing Asia Pty Ltd. Hal 30.

4. motif politik dimana pembentukan BTA's tidak hanya karena adanya motif ekonomi semata namun juga adanya kepentingan politik dimana negara melakukan BTA's karena adanya dorongan dari partai politik, serta adanya kepentingan dari elit politik tertentu sehingga kemudian secara tidak langsung BTA's digunakan sebagai sarana pemenuhan kepentingan politik domestic negara

b. Faktor Spesifik

Faktor spesifik adalah faktor pendorong pembentukan BTA yang memiliki fokus berdasarkan isu-isu tertentu, misalnya perdagangan, politik atau isu non ekonomi. Faktor ini dibedakan menjadi 3, yaitu *economic, strategy, event driven*.²¹

1. *Economic*

Economical motivated BTA adalah faktor yang menjadi pendorong pembentukan BTA yang memiliki fokus pada isu ekonomi. Kategori ini dibagi dalam dua sub kategori yaitu, *sector driven* adalah motivasi pembentukan BTA untuk memperluas sektor tertentu yang menjadi unggulan sebuah negara, atau karena ada keinginan mengecualikan sektor tertentu beberapa sektor antara yang ingin diperluas dan sektor yang diamankan sedangkan *market access* adalah sebagai bentuk upaya bagi negara untuk menciptakan akses pasar atau mengamankan akses pasar yang telah ada.

²¹ *Ibid.*,

2. *Strategically*

Strategically Motivated BTA adalah faktor pendorong BTA yang berfokus pada isu-isu strategis. Faktor ini dibagi menjadi dua kategori yaitu, *lobby driven* dan *terror driven*. *Lobby driven* adalah pembentukan BTA dengan tujuan negara ingin menegosiasikan suatu isu strategis suatu negara dengan pihak terkait. Dapat dikatakan mereka memiliki agenda strategis diluar perdagangan yang ingin dicapai melalui negosiasi BTA. *terror driven* adalah alasan pembentukan BTA dalam rangka memerangi adanya terorisme yang dimasukkan kedalam negosiasi perjanjian bilateral kedua belah pihak negara. Diharapkan melalui BTA negara tujuan tidak menjadi ancaman bagi negara tersebut.

3. *Event driven*

Event Driven adalah faktor yang mendorong suatu penandatanganan BTA yang terbentuk berdasarkan keinginan negara untuk mempercepat integrasi dengan negara atau kelompok negara tertentu. *Event Driven* terbagi menjadi tiga sub kategori yaitu PTA, WTO *accession* dan politik.

2.3. Operasionalisasi Konsep

Berikut merupakan tabel penjelasan dari operasionalisasi konsep yang akan penulis gunakan untuk membantu proses penelitian :

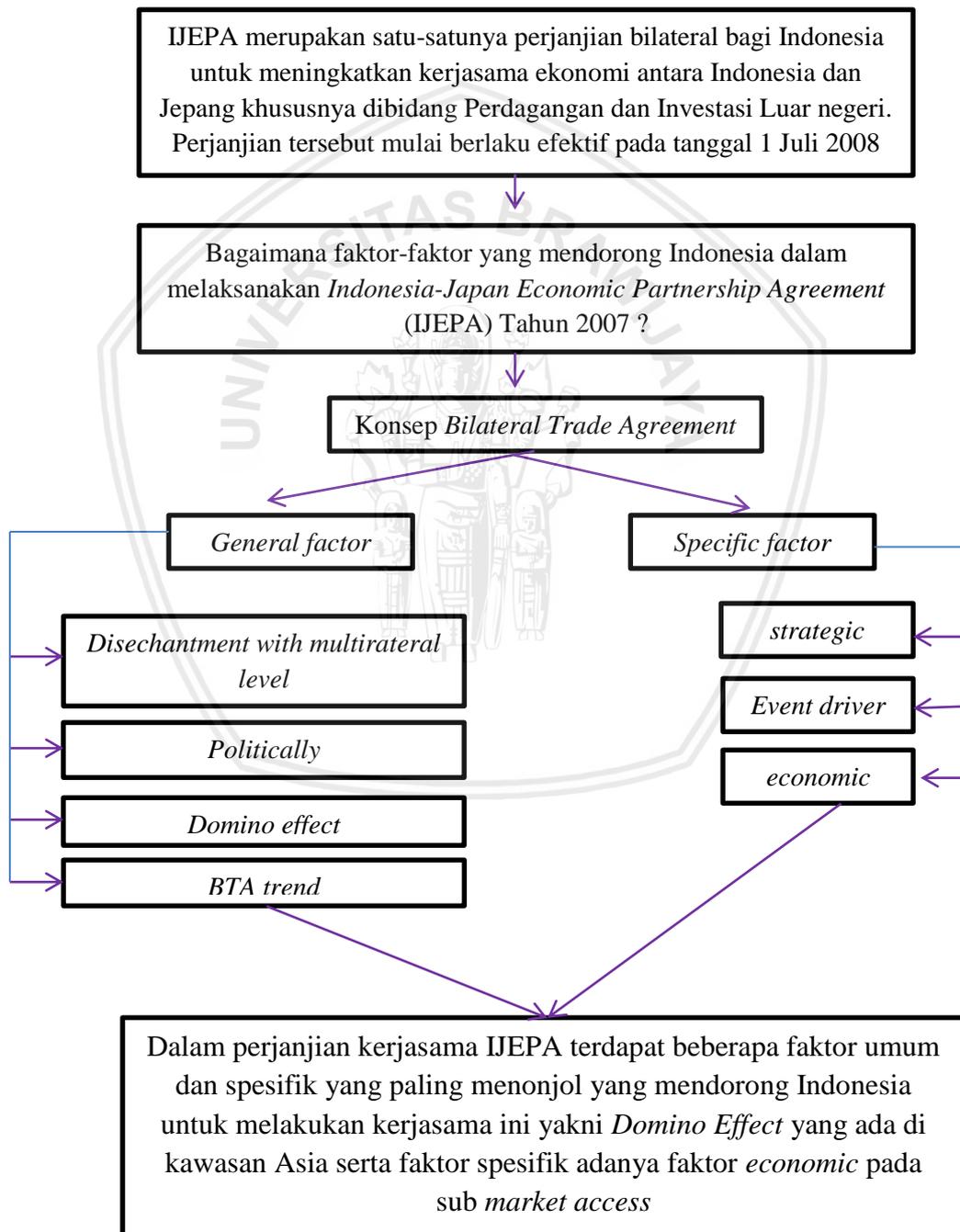
Tabel. 2.1. Operasionalisasi Konsep

Teori	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Bilateral Trade Agreement</i>	<i>General Factor</i>	Kekecewaan terhadap institusi multilateral	Pernyataan adanya kekecewaan terhadap kebijakan organisasi multilateral WTO
		<i>Domino effect</i> , yaitu adanya trend munculnya BTA	Adanya momentum di kawasan dimana trend <i>bilateral trade agreement</i> digunakan beberapa negara
		BTA cenderung tidak terlalu memicu perhatian masyarakat luas	Sedikitnya pengawasan media mengenai IJEPA di Indonesia
		Motif politik	Ada atau tidaknya dorongan politik dalam negeri yang mempengaruhi
	<i>Specific factor</i>	<i>Economy</i>	Adanya data dan fakta mengenai peningkatan Industri Jepang di Indonesia juga peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia dalam sektor Industri.
		<i>Strategy</i>	Adanya keputusan terhadap keputusan penurunan biaya ekspor impor antara Indonesia dan Jepang untuk meningkatkan Ekspor Indonesia terhadap Jepang http://www.kemenperin.go.id/artikel/5804/Kebijakan-IJ-EPA-Dievaluasi
		<i>Event driven</i>	Percepatan penandatanganan setelah dilakukan pembahasa IJEPA oleh Indonesia dan Jepang



2.4. Alur Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Adapun alur pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



2.5. Hipotesis

Menurut latar belakang di atas dan konsep yang ada penulis memberikan hipotesis untuk menjawab masalah bahwa Indonesia memiliki faktor-faktor yang mendorong adanya perjanjian kerjasama ini yang dikualifikasikan pada faktor general dan faktor spesifik. Faktor general yaitu domino effect yang terjadi di kawasan Asia terutama trend negara timur yang banyak melakukan inisiasi kerjasama Free Trade Agreement yang membuat Indonesia juga melakukan kerjasama dengan salah satu negara maju di Asia yaitu Jepang. Sedangkan spesifik faktor adalah pada faktor ekonomi pada sub *market access* yaitu sebagai bentuk upaya bagi negara untuk menciptakan akses pasar atau mengamankan akses pasar yang telah ada, diamankan sedangkan *market access* adalah sebagai bentuk upaya bagi negara untuk menciptakan akses pasar atau mengamankan akses pasar yang telah ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan segala informasi yang berhubungan dengan kasus apa yang menjadi fokus penelitian, dan mengumpulkan gejala yang ada dalam kasus yang dipilih pada penelitian ini.²² Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.²³

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada penelitian ini terkait faktor-faktor yang mendorong Indonesia dalam melaksanakan perjanjian kerjasama IJEPA yang dalam hal ini terdapat faktor general dan faktor spesifik. Dalam faktor general terdapat *domino effect* sedangkan dalam faktor spesifik terdapat *market access* yang mendorong Indonesia terfokus pada sektor ekonomi pada tahun 2007.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017, Yogyakarta: Alfabeta

²³ Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

3.3. Teknik Pengumpulan data

Dalam hal teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tulisan-tulisan ilmiah tentang kerjasama Indonesia dan Jepang dalam *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership*. Sumber penulisan yang digunakan dapat berasal dari dokumen-dokumen negara, buku-buku teks yang berkaitan dengan topik pembahasan, jurnal-jurnal ilmiah, artikel dari hasil analisa, dan sumber-sumber lain yang didapat dari media masa seperti koran, majalah, internet, dan opini dari beberapa ahli. Sumber-sumber yang penulis gunakan merupakan sumber sekunder yang diperoleh dari interpretasi atau pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu mereduksi data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan triangulasi. Kemudian dari hasil analisis data tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan penelitian yang akan menggambarkan pandangan penulis pula. Menurut Miles and Huberman, dalam proses analisis terdiri dari kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasannya :²⁴

²⁴ Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini bisa dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting serta pencarian tema dan polanya. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara menarasikannya dalam bentuk teks tertentu yang terorganisir secara sistematis. Akan tetapi hal ini mempunyai tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Verifikasi

Dalam langkah terakhir ini, peneliti melakukan verifikasi yang dimana peneliti menyimpulkan hasil penelitian, penelitian dianggap kredibel apabila terdapat bukti-bukti yang valid dan konsisten untuk itu dilakukan pengecekan kembali data yang diperoleh dari sumber data yang

ada sangatlah penting dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan IJEPa oleh Indonesia.

3.5. Sistematika Penulisan

BAB I (PENDAHULUAN)

Bagian ini berisi uraian mengenai, latar belakang masalah yang meliputi urgensi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II (KERANGKA KONSEPTUAL)

Bagian ini berisi teori kepentingan nasional yang menjadi dasar penelitian untuk membangun alur logika dalam menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang meliputi studi terdahulu, kerangka konseptual, operasionalisasi konsep dan argument utama.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Bagian ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB IV (GAMBARAN UMUM)

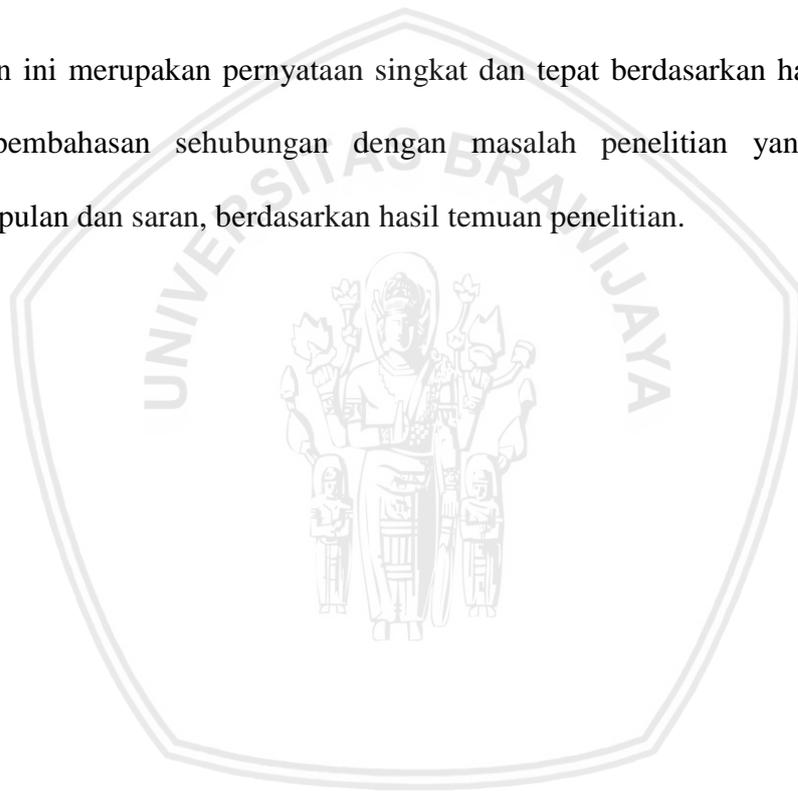
Bagian ini berisi gambaran umum mengenai isu yang diteliti, dan diperoleh dari studi pustaka atau telaah pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penelitian.

BAB V (PEMBAHASAN)

Bagian ini berisi pembahasan serta analisis data-data temuan penelitian dengan menginterpretasikan dan membandingkan data tersebut dengan konsep yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

BAB VI (PENUTUP)

Bagian ini merupakan pernyataan singkat dan tepat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sehubungan dengan masalah penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil temuan penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-JEPANG DAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

4.1. Dinamika Hubungan Bilateral Jepang – Indonesia

Hubungan Indonesia dan Jepang telah berjalan selama 60 tahun dan mengalami banyak pasang surut hubungan yang menarik. Di awal-awal hubungan banyak dilandasi dan diwarnai oleh kegiatan di bidang ekonomi, dimana secara perlahan namun pasti telah menciptakan rasa saling membutuhkan dan ketergantungan. Jepang sangat membutuhkan sumber data energi yang dimiliki Indonesia berupa minyak dan gas serta sumber daya alam lainnya. Selain itu, di dalam perkembangannya, Indonesia juga telah menjadikan Jepang sebagai salah satu tujuan utama ekspor untuk produk-produknya. Jepang juga sebagai salah satu investor utama dan terbesar di Indonesia, sehingga sampai saat ini ketergantungan berkembangnya industri di Indonesia terhadap Jepang sangat dominan.

Dalam buku berjudul “Indonesia di Mata Masyarakat Jepang di Hindia Belanda 100 Tahun lalu Dalam Kartu Pos Bergambar Foto” karya Aoki Sumio yang di dalamnya memaparkan fakta bahwa dampak orang Jepang hijrah ke Asia Tenggara terutama dampak sejak resporasi Meiji yang membuat kehidupan perekonomian Jepang memburuk. Lainnya terbagi menjadi pengusaha kecil, pemilik toserba, penjual obat, bahkan lainnya tidak mempunyai pekerjaan. Perhimpunan orang Jepang atau *Nihonjikai* sudah ada di beberapa daerah di Indonesia, di Medan dibentuk pada tahun 1897, Dobo tahun 1905, Manado tahun

1907, di Batavia tahun 1913, Bandung, Surabaya, dan Semarang tahun 1914.²⁵ fakta tersebut menunjukkan bahwa sejak dahulu sebelum Perang Dunia ke II masyarakat Jepang sudah lama bermukim dan telah hidup harmonis di Indonesia.

Hubungan kerjasama antara Jepang dan Indonesia dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Indonesia, serta Perjanjian Pampasan Perang 20 Januari 1958 di Jakarta. Pada perjanjian tersebut terdapat wakil-wakil yang berkuasa penuh yang diangkat oleh Perserikatan-Bangsa-Bangsa yaitu Aiichiro Fujiyama selaku Menteri Luar Negeri Jepang dan Soebandrio selaku Menteri Luar Negeri Indonesia untuk memeriksa surat-surat kuasa masing-masing dan menandatangani perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian tersebut sebagai tanda berakhirnya perang antara Jepang dan Indonesia, dan sebagai awal hubungan baru yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Disebutkan dalam pasal 6 Perjanjian perdamaian, jika terjadi perselisihan maka akan dilakukan perundingan sebagai penyelesaiannya. Namun, jika hal tersebut tidak memperoleh kesepakatan dalam waktu enam bulan maka salah satu pihak dapat mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan penyelesaian.²⁶

Setelah adanya perjanjian perdamaian tersebut, Jepang mulai aktif dalam memperbaiki Image dirinya sebagai negara yang kejam waktu kolonialisasi menjadi Negara pemberi bantuan pembangunan sebagai bentuk ganti rugi perang sesuai dengan perjanjian perdamaian San Francisco 1951 kepada 12 negara di

²⁵ www.sorotindonesia.com/indonesia-di-mata-masyarakat-jepang-100-tahun-lalu/ diakses pada tanggal 1 Juni 2019 Pukul 06.15 WIB

²⁶ Perjanjian Perdamaian Antara Jepang dan Republik Indonesia, Treaty, diakses dari www.gwu.edu/~memory/data/treaties/Indonesia.pdf pada tanggal 1 Juni 2019 07.05 WIB

Asia termasuk Indonesia. Pemberian ganti rugi tersebut juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjalin kerjasama ekonomi luar negeri sekaligus memberikan dukungan bagi perkembangan Jepang selanjutnya.

Di kawasan Asia, Jepang intensif memberikan dana bantuan ODA (*Official Development Assistance*) dan terutama kepada Indonesia, Negara yang posisinya sebagai bekas jajahannya namun kaya akan sumber daya mineral dibanding dengan Negara Asia lain . Hal tersebut Jepang lakukan untuk memperkuat bargaining position sebagai Negara pendonor terbesar, yang kemudian ia gunakan sebagai strategi kebutuhan ekspornya. Mengingat untuk mencukupi kebutuhan ekspornya Jepang butuh pasokan sumber daya mineral mentah yang akan Jepang olah menjadi barang jadi dan setengah jadi.²⁷

Selain itu kedekatan hubungan politik Indonesia dengan Jepang juga ditunjukkan dengan keluwesan hubungan antar kepala negara selama puluhan tahun. Jatuhnya Soeharto, membawa perubahan cukup besar dalam sistem perpolitikan Indonesia. Tekanan agar pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi politik dan ekonomi gencar dilakukan oleh masyarakat domestik dan Internasional. hal ini juga turut mempengaruhi kebijakan ODA Jepang setelah jatuhnya Soeharto.

Selain itu dalam *Country Assistance Strategy for Indonesia* tahun 2004, pemerintah Jepang juga menempatkan penciptaan masyarakat yang demokratis dan adil sebagai pilar kedua dalam prioritas area bantuan. Adapun realisasi dari hal tersebut adalah pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan pertanian dan perikanan, meningkatkan pendapatan dan

²⁷ Ibid.

kesejahteraan, meningkatkan jasa publik di bidang pendidikan, kesehatan dan obat-obatan, reformasi pemerintah di bidang hukum, pelayanan kepolisian, bantuan untuk desentralisasi serta pemeliharaan lingkungan dan pencegahan bencana serta penanganannya.²⁸

Jepang telah merangkai berbagai program yang mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang makmur dan demokratis seperti bantuan untuk pelaksanaan pemilu, desentralisasi, reformasi pemerintahan, dan berbagai kegiatan lainnya. Akan tetapi apabila dicermati dari pembahasan di atas, Jepang terkesan sangat hati-hati dalam mengimplementasikan program-programnya di Indonesia. Kepercayaan bahwa pembangunan masyarakat yang demokratis akan menuntut ketidakstabilan politik, merupakan salah satu alasan mengapa Jepang terlihat lambat merespon tuntutan demokratisasi atau reformasi politik di Indonesia.²⁹

Sedangkan kerja sama teknik merupakan kerjasama yang diberikan Jepang untuk membantu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di negara-negara berkembang. Karena "upaya pembangunan manusia" akan memegang peranan penting dalam perkembangan sosial ekonomi dan Jepang berharap dengan adanya bantuan teknik tersebut, teknik serta pengetahuan dapat dialihkan kepada para teknisi dan pejabat dari negara berkembang. Kerjasama teknik Jepang terapkan dengan cara mengundang tenaga magang, mengirim tenaga ahli dan relawan,

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

mengirim bantuan mesin dan peralatan, survey melalui badan pemerintah independen yang bernama, "*Japan International Cooperation Agency (JICA)*".³⁰

Hubungan Jepang dan Indonesia semakin terintegrasi dengan ditandatanganinya berbagai bentuk kerjasama *Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future* yang didasarkan atas *the Japan – Indonesia Joint Statement Partners for New Challenges*. Kerjasama tersebut ditandatangani pada bulan Juni 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, serta upaya untuk menggali kemungkinan-kemungkinan baru untuk meningkatkan hubungan Negara secara kongkrit.³¹

Selain kerjasama di atas, pemerintah di Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Asia Timur. Kedua negara sepakat untuk memelihara dan berkontribusi aktif dalam memelihara stabilitas kawasan. Indonesia mengerti tentang keinginan Jepang untuk lebih berperan dalam bidang keamanan dengan tujuan bisa ikut berkontribusi dalam penciptaan stabilitas perdamaian di kawasan Asia. Sekaligus Indonesia juga memberikan saran kepada Pemerintahan Jepang agar dibangun kerja sama lebih erat lagi antara Jepang dan Indonesia, antara Jepang dengan negara-negara di kawasan ASEAN agar semua dapat berkontribusi pada perdamaian yang diinginkan oleh semua pihak.

³⁰ Ibid.

³¹ Nurul Laili, Bahasa Jepang Pilihan Menuju Entrepreneur, Jurnal Online, Diakses dari www.download.portalgaruda.org/article.php?article=116613&val=5316 pada tanggal 1 Juni 2019.

4.2. Jenis Mitra *Bilateral Trade Agreement* Indonesia

Definisi bilateral *free trade agreement* menurut Jayant Menon adalah perjanjian perdagangan yang disepakati oleh dua negara anggota, atau antara satu negara dengan satu *plurilateral trade agreement* (PTA), atau antara satu BTA dengan satu PTA, atau antara di BTA atau antara dua PTA. Dalam hal melakukan perjanjian bilateral ini, Indonesia juga melakukan dengan beberapa negara lain selain dengan negara Jepang. Berikut adalah penjelasannya :

a. Indonesia *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA)

Peluncuran IEU-CEPA ini merupakan tindak lanjut dari disepakatinya scoping paper perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa di sela-sela kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Brussel, Belgia, pada 21 April 2016. Mendag Tom menjelaskan, peluncuran perundingan CEPA ini dilakukan tiga bulan setelah scoping paper disepakati karena Komisi Eropa perlu mendapatkan mandat melakukan perundingan dari Dewan Uni Eropa berdasarkan scoping paper yang telah disepakati pada April lalu. Data Badan Pusat Statistik merangkum total perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa pada 2015 mencapai USD 26,1 miliar. Indonesia mencatatkan total ekspor ke Uni Eropa sebesar USD 14,8 miliar dan impor dari Uni Eropa sebesar USD 11,3 miliar.³²

Sementara itu, total aliran investasi (*direct investment flows*) Uni Eropa ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir (2005-2015) mencapai USD 9,8 miliar yang

³²<https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/07/18/ri-uni-eropa-resmi-luncurkan-perundingan-cepa-id0-1468838155.pdf>

terfokus di sektor-sektor konstruksi, transportasi, tanaman pangan, perkebunan, dan pertambangan. sebagai blok ekonomi terbesar di dunia, Uni Eropa menawarkan kesempatan berharga bagi Indonesia, baik untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa maupun sebagai sumber investasi asing langsung. Mendag Tom juga menggarisbawahi bahwa perundingan CEPA ini akan menempatkan Indonesia pada posisi lebih baik dalam mata rantai pasokan global karena perekonomian kedua pihak bersifat komplementer.

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia dengan produk ekspor utama antara lain mencakup produk-produk pertanian dan perikanan, furnitur, komponen mesin, tekstil dan alas kaki, serta produk plastik dan karet. Sementara itu bagi Uni Eropa, Indonesia adalah mitra dagang dari Asia Tenggara terbesar ke-5 namun berada di peringkat ke-30 dalam urutan mitra dagang Uni Eropa secara global. Ekspor utama Uni Eropa ke Indonesia antara lain terfokus pada mesin, peralatan transportasi, dan produk kimia selain jasa. Kesepakatan untuk merundingkan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa didasarkan pada sebuah kajian bersama yang dilakukan pada 2010 dan disampaikan kepada kedua pemerintah pada 4 Mei 2011.

Kajian yang berjudul *Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement* ini dilakukan sebuah tim yang melibatkan kalangan pemerintahan, akademisi, dan bisnis dari kedua pihak. Kajian ini menunjukkan potensi yang sangat besar bila hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dapat diikat dalam sebuah perjanjian kemitraan yang sifatnya komprehensif dan mencakup isu-isu masa kini.

Langkah awal ditempuh Indonesia dan Uni Eropa pada 2012 dengan membahas scoping paper untuk menentukan cakupan dan kedalaman komitmen yang akan dirundingkan kedua pihak. Diselingi pergantian pemerintahan, baik di Indonesia maupun di Uni Eropa, pembahasan scoping paper ini akhirnya dapat diselesaikan pada April 2016 saat Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke Brussel, Belgia.³³

Sesuai kesepakatan yang tertuang dalam scoping paper, Indonesia dan Uni Eropa akan memulai perundingan yang antara lain mencakup isu-isu perdagangan barang, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, regulasi teknis di bidang sanitari dan fitosanitasi (SPS), regulasi teknis di bidang hambatan teknis perdagangan (TBT), perdagangan jasa, belanja pemerintah, Hak Kekayaan Intelektual dan sebagainya, persaingan usaha, transparansi kebijakan, penyelesaian sengketa, serta perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

b. IA-CEPA

Indonesia dan Australia memasuki babak baru dalam hubungan bilateral yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif kedua negara (IACEPA), di Jakarta. Penandatanganan tersebut dilakukan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon Birmingham, dengan disaksikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di hadapan ratusan pelaku usaha, wakil pemerintah, dan undangan lainnya. Kedua Menteri Perdagangan menegaskan, IA-CEPA memiliki semangat saling menguntungkan, bukan saja dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Salah satu keuntungan IA-

³³ Ibid.

CEPA bagi Indonesia, antara lain dihapuskannya bea masuk impor seluruh pos tarif Australia menjadi nol persen.³⁴

Di sektor perdagangan jasa, Indonesia akan mendapatkan akses pasar perdagangan jasa di Australia, antara lain kenaikan kuota visa kerja dan liburan, yaitu dari 1000 visa menjadi 4100 visa di tahun pertama implementasi IA-CEPA dan akan meningkat sebesar 5 persen di tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, Indonesia juga akan mendapatkan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti program magang yang dibuat berdasarkan kebutuhan sektor industri dan ekonomi Indonesia yang berkaitan langsung dengan investasi Australia di sektor pendidikan kejuruan. Program ini menyediakan 200 visa magang untuk sembilan sektor prioritas, yaitu pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan infrastruktur, kesehatan, energi, pertambangan, jasa keuangan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selanjutnya, ada juga program pertukaran tenaga kerja antarperusahaan Indonesia-Australia melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta peningkatan standar profesi Indonesia yang akan dimulai dengan adanya kesepakatan terkait pengakuan pada profesi teknisi dan insinyur. Dari segi iklim investasi, IA-CEPA akan memberikan perlindungan investor yang lebih baik. Terdapat 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia dan dengan IA-CEPA diharapkan investasi Australia akan bertambah, baik secara kuantitas maupun kualitas, khususnya di sektor pendidikan tinggi, kesehatan, industri, konstruksi, energi, pertambangan,

³⁴<https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2019/03/06/indonesia-australia-masuki-babak-baru-hubungan-bilateral-perjanjian-dagang-ia-cepa-ditandatangani-id0-1551864965.pdf>

pariwisata, dan keterampilan (vokasi). Peningkatan di berbagai sektor tersebut dapat mendorong daya saing Indonesia di kancah global.³⁵

Negosiasi IA-CEPA diluncurkan pada November 2010 dan berlangsung selama 12 putaran dan beberapa pertemuan tingkat ketua negosiator. Cakupan perundingan IA-CEPA adalah perdagangan barang meliputi aspek nontarif, berbagai measures, ketentuan asal barang, prosedur bea cukai dan fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi; perdagangan jasa yang meliputi ketenagakerjaan, jasa keuangan, telekomunikasi, jasa profesional; investasi; perdagangan elektronik; kebijakan daya saing; kerja sama ekonomi; serta ketentuan kelembagaan dan kerangka kerja.

4.3. Tinjauan Tentang IJEPA

Dalam politik ekonomi internasional terdapat beberapa persoalan penting yaitu hubungan yang tepat antara politik dan ekonomi, pembangunan dan keterbelakangan di dunia ketiga dan sifat luasnya globalisasi ekonomi negara maju dengan negara dunia ketiga. Dalam hal ini masalah disparitas antara neagara maju dengan negara dunia ketiga menjadi agenda ekonomi politik internasional semakin penting. Dalam konteks tersebut kemudian liberalisme ekonomi yang diimplementasikan dalam bentuk kerjasama ekonomi baik bilateral maupun dengan negara maju menjadi formula bagi negara berkembang dalam peningkatan kapabilitas perekonomian.

³⁵ Ibid.

Negara berkembang yang sedang dalam masa pertumbuhan ekonomi seperti Amerika Latin dan sebagian besar negara berkembang lainnya saat ini seperti Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan sedang mencoba menjalankan standar ekonomi nasionalnya seperti negara maju. Indonesia saat ini, secara ekonomi termasuk ke dalam negara dunia ketiga atau negara berkembang yang sedang mencoba untuk menyejajarkan diri dengan negara-negara lain yang lebih maju. Salah satunya dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, dalam hal ini Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam bentuk IJEPA (*Indonesia –Japan Economic Partnership Agreement*).

Demi lebih mempererat hubungan kerjasama yang dijalin oleh kedua Negara yaitu Indonesia-Jepang dalam bidang Industri, dan untuk merealisasikan kerjasama yang telah direncanakan, setelah penandatanganan *Momorandum Of Understanding* (MoU) pada tanggal oleh kedua belah pihak sebagai tanda bahwa mereka telah menjalin suatu kerjasama yang baik, terencana dan terarah, Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang mengadakan pertemuan selama menjalin kerjasama ini berjalan. Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari mekanisme kerjasama antara Indonesia-Jepang dalam memperlancar terlaksananya hubungan kerjasama tersebut dengan baik.

4.3.1. Sejarah Terbentuknya IJEPA

Jepang menawarkan proposal pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Tawaran pembentukan FTA dari Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi pada tanggal 22-25 juni 2003 tersebut membuahkan tindak lanjut kerjasama Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Kerjasama IJEPA ini rupanya sangat

didukung oleh kerjasama Jepang dengan ASEAN karena dengan merangkul ASEAN, Jepang mempunyai jalur masuk perdagangan ke negara Asia Tenggara yang lebih mudah dan menguntungkan. Selain itu, liberalisasi pasar di Indonesia membuat produk-produk Jepang menjadi lebih mudah masuk ke Indonesia.

Dalam joint announcement by the prime minister of Japan and the president the Republic of Indonesia on the possibility of the economic partnership agreement antara Indonesia dan Jepang tersebut, yang di umumkan pada tanggal 8 september 2003 Megawati dan Koizuma sepakat untuk menugaskan kedua pejabat di kedua pemerintahan untuk melakukan pertemuan pendahuluan mendiskusikan kemungkinan pembentukan EPA antara Indonesia dan Jepang.

Pada tanggal 8 september 2003, pertemuan pendahuluan diadakan di tokyo, Jepang dan di isi dengan pembahasan mengenai pandangan kedua negara mengenai FTA. Pada tanggal 6 November 2004. Kepala Nippon Kaidaren, Hiroshi Okuda mengunjungi presiden SBY untuk meneruskan kembali pembicaraan mengenai FTA Indonesia dan Jepang. Sebetulnya inisiatif Jepang untuk membentuk EPA dengan Indonesia terkait dengan pembentukan EPA dengan ASEAN. Hal ini ditegaskan oleh PM Jepang Koizumi pada saat KTT ASEAN – Jepang di Phnom Penh pada tanggal 5 November 2002.

Selanjutnya, pada tanggal 15 desember 2004 Menteri Ekonomi Jepang Soichi Nakagawa menenmui Menko Indonesia Aburizal Bakrie untuk membicarakan rencana kesepakatan baru yang merupakan lanjutan dari penawaran insentif investasi pengusaha Jepang yang disampaikan kepada Presiden SBY pada pertemuan sebelumnya. Keesokan harinya pada tanggal 16 desember 2004 Nakagawa menemui Menteri perdagangan Mari Elka Pangestu menyepakati untuk

membuat kelompok studi bersama (*Joint Study Group/JSG*) yang bertugas mengkaji dan memberikan penilaian menyeluruh tentang kemungkinan pembentukan FTA, biaya dan keuntungan serta sector-sektor apa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Hasil JSG merekomendasikan manfaat perlunya EPA antara kedua negara berupa *Indonesia – Japan Economic Partnersip Agreement (IJEPA)* yang kemudian di ikuti dengan seri perundingan negosiasi sebanyak 6 (enam) putaran sejak July 2005 sampai dengan November 2006 pada akhir negosiasi tanggal 24 november 2006 di tokyo kedua *Chef Negosiation* , Ambassador Soemadi DM Brotodiningrat dan Mr. Mitoji Yamunaraka menandatangani *Record of Discussion* yang mencakup persetujuan prinsip atas bagian-bagian utama dari 13 kelompok negosiasi dan menyepakati untuk melakukan finalisasi dari perjanjian sesegera mungkin. Pada tanggal 21-22 Juni 2007, telah dilakukan negosiasi akhir dengan kerangka wropupmeeting. Hasil negosiasi tersebut berupa *Recordof Discussion* yang kemudian disepakati kedua *Chef Negosiator*, yaitu Ambassador Soemadi DM Bordiningrat dan Mr. Masaharu kohno, wakil Menteri Luar Negeri. Hasil tersebut sebagai landasan bagi langkah selanjutnya yang akan menyelesaikan *Pending Issue* dan merupakan *draft teks* dari sisi bahasa dan hukum.³⁶

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia, dan yang paling komprehensif. IJEPA adalah sebuah *Free Trade*

³⁶ <http://edimirantojelajahpena.wordpress.com> diakses pada tanggal 2 Juni 2019

Agreement New-Age (FTA babak baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO plus (*World Trade Organisation Plus*) (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*Capasitas Building*) sebagai bagian dari *Partnership Agreement*.

Didalam perjanjian IJEPA, Jepang menyatakan komitmennya untuk membantu pihak Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industrinya (*capacity building*) agar produk/jasanya bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang melalui elemen perjanjian atau *Cooperation*.³⁷

Konsep utama atau pilar dasar kerjasama FTA antara Indonesia dan Jepang adalah untuk meningkatkan daya saing industri masing-masing negara melalui :

1. Liberalisasi akses Pasar
2. Fasilitas
3. Kerjasama melalui *capacity building* untuk sector-sektor industri prioritas

Sementara itu Indonesia tentunya juga mengharapkan dengan adanya IJEPA dapat mendorong meningkatkan investasi Jepang di Indonesia yang selanjutnya dapat mengembangkan industri dan teknologi serta sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional maupun internasional. Jepang juga sebetulnya mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia, rakyat Indonesia adalah konsumen terbesar ke-empat di dunia, serta mempunyai daya beli yang sangat tinggi.³⁸

³⁷ Achdiat Atmawinata, *Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global*, Departemen Perindustrian, Desember 2008, h. 3-16.

³⁸ *Ibid.*

4.3.2. Tujuan dan Prinsip Dasar Terbentuknya IJEPA

EPA antara Indonesia dan Jepang terbentuknya atas kesepakatan antara dua kepala negara untuk mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin sangat lama antara kedua negara tersebut. Dalam peningkatan kerjasama, Indonesia dan Jepang sepakat membangun perjanjian kemitraan ekonomi atau *Economic Partnership Agreement* (EPA).

Tujuan IJEPA adalah meningkatkan kinerja ekonomi kedua pihak melalui liberalisasi perdagangan bebas, jasa, dan investasi, fasilitas dan kerja sama ekonomi Jepang memanfaatkan EPA bilateral untuk memperkuat akses pasar di negara-negara yang menjadi target produk industrinya. Sedangkan Indonesia menjadikan EPA sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang (*proper balance*), khususnya menyangkut aspek kerjasama guna membangun kapasitas ekonominya.

Selain itu, tujuan IJ-EPA adalah juga untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, mendorong peningkatan investasi Jepang di Indonesia yang diharapkan selanjutnya dapat mengembangkan industri dan teknologi serta memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional dan internasional. Peningkatan investasi dapat membuka sekaligus penyerapan tenaga kerja yang besar di Indonesia.

Dalam IJ-EPA, untuk perdagangan barang disepakati moda penurunan tarif bea masuk dilakukan secara bertahap, dimana dalam penurunan tarif tersebut terdapat beberapa kategori produk, salah satunya adalah produk yang masuk dalam skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS). USDFS adalah

pemberian fasilitasi yang dipercepat untuk produk Jepang yang masuk ke Indonesia terkait dengan industri *driven sector* (otomotif, elektronik, alat berat, dan pembangkit energi) dengan syarat utama digunakan sebagai bahan baku dan belum diproduksi / tidak ekonomis dibuat di dalam negeri. Sebagai kompensasi terhadap pemberian fasilitas USDFS oleh Indonesia, pihak Jepang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan daya saing produknya, sehingga bisa melewati batas toleransi hambatan non tarif di Jepang.

Bantuan Jepang tersebut tertampung dalam elemen *cooperation*, dan khusus untuk produk industri difokuskan pada pengembangan industri manufaktur atau disebut *Manufacturing Industri Development Center* (MIDEC). MIDEC berfungsi sebagai motor penggerak untuk pembangunan kapasitas industri (*industrial capacity building*) guna meningkatkan daya saing produk industri Indonesia yang meliputi tiga belas sektor, yaitu *metal working, welding, mold & dies, energy conservation, export & investment promotion, SME's, automotives, electric/electronics, steel/ steel products, textile, petrochemical & oleochemicals, nonferrous, dan food & beverages*.

Kedua negara tersebut juga telah sepakat untuk bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai penting, seperti kebebasan, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan aturanhukum serta untuk mengatasi tantangan-tantangan baru di tingkat bilateral, regional dan global. Indonesia dan Jepang juga berkomitmen untuk mengatasi tantangan ekonomi dan strategis baru dan mencari

peluang baru, baik yang disajikan oleh globalisasi, bersama-sama melalui kerjasama bilateral konkrit.³⁹

4.3.3. Sektor-Sektor Dalam IJEPA

Di dalam perjanjian kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam IJEPA terdapat beberapa sektor kerjasama, yaitu :

1. *Trade in goods* (perdagangan)

Dalam bidang perdagangan, mempunyai perdagangan yang sama bahwa IJEPA sebaiknya memasukkan perjanjian di bidang perdagangan yaitu, penurunan biaya tarif adalah elemen penting untuk memperkuat kemitraan ekonomi di antara kedua negara. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Jepang yang lebih dikenal dengan Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) telah menandatangani oleh kedua pemimpin negara pada tanggal 20 Agustus 2007 yang lalu.

2. *Rules of Origin* (peraturan dasar)

Kedua belah pihak mempunyai pandangan bahwa peraturan baik di bawah ASEAN-*Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement* maupun dibawah EPA bilateral disatukan satu sama lain.

3. *Custom Procedure* (prosedur tentang ekspor impor dan bea Cukai)

Kedua pihak akan memberikan informasi dan pertukaran dengan maksud memfasilitasi perdagangan. Pihak Jepang menunjukkan keseimbangan antara fasilitas perdagangan dan menjamin keamanan adalah penting dalam bidang ekspor-impor dan bea cukai. Industri Jepang meminta untuk meningkatkan

³⁹ Achdiat Atmawinata, Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, Departemen Perindustrian, Desember 2008.

kemungkinan ekspor-impordan bea cukai lewat perbaikan lebih lanjut terhadap kekurangan dari ekspor-impor dan bea cukai, fasilitas ekspor-impor dan bea cukai, menyeragamkan dari penggunaan peraturan-peraturan, dan lain-lain.

Berdasarkan opini tersebut pihak Jepang mengatakan bahwa untuk ekspor-impor dan bea cukai harus dimasukkan dalam EPA. Dengan point-point berikut ini :

- a) Memastikan tidak ada kelemahan
- b) Kerjasama dan pertukaran informasi antara yang bertanggung jawab atas ekspor impor dan bea cukai dengan maksud untuk memperlancar aktifitas perdagangan melalui penyederhanaan dan keselarasan dari ekspor-impor dan bea cukai, dan menjamin pelaksanaan menentang perdagangan barang-barang gelap
- c) Pengakuan yang pantas dalam melaksanakan mekanisme. Pihak Indonesia memberikan Informasi mengenai ekspor-impor dan bea cukai, yang sudah disederhanakan. Dalam hal ini, pihak Indonesia menegaskan bahwa Indonesia akan berusaha terus menerus memperbaiki prosedur ekspor-impor dan bea cukai. Pihak Indonesia mempunyai pandangan atas pentingnya kerjasama antara kedua belah pihak yang berwenang dalam bidang diatas.

4. *Trade In Service* (Perdagangan Jasa)

IJEPA akan menyediakan mekanisme untuk perbaikan lingkungan peusahaan dan promosi keyakinan perusahaan, dengan partisipasi kedua Pemerintah Indonesia dan Jepang, sektor pribadi masing-masing dan organisasi relevan lainnya. Pihak Jepang memberikan perhatiannya di bidang

liberalisasi jasa yang berhubungan dengan pembuatan jasa, informasi dan pelayanan keuangan, dan pelayanan hukum. Pihak Jepang menjelaskan bahwa pembuatan pelayanan dapat membantu perbaikan prasarana di Indonesia, dan pelayanan yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Industri Pabrik yang mana pihak Jepang penanam modal terbesar dalam bidang ini diantara penanam modal lainnya dalam bidang ekonomi yang ada di Indonesia.

Pihak Indonesia juga memberikan perhatiannya dalam pelayanan di bidang liberalisasi, termasuk pelayanan kepariwisataan, informasi dan komunikasi, transportasi maritime, pembuatan, pendidikan, dan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan. Pihak Indonesia juga menerangkan adanya kemajuan dalam bidang liberalisasi yang sudah dilakukan di bawah WTO (*World Trade Organization*) dalam bidang perdagangan dan pelayanan keuangan. Sejauh ini pelayanan distribusi, pihak Indonesia menerangkan bahwa area ini sudah dibuka untuk partisipasi asing.

5. *Investment* (Investasi)

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan penting bagi Investasi Jepang, walaupun peringkatnya sebagai negara tujuan, menurun sejak krisis ekonomi.

Di bidang manufaktur aliran terbesar adalah di sektor otomotif/suku cadang, elektrik/elektronik, dan sektor kimia serta peralatan kantor :

- a) Memperdalam struktur Industri dengan investasi industri pendukung (*componen, parts, mould and dies*), dimana supplier Indonesia dapat juga berkembang dengan fasilitas dari *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC),

b) Investasi untuk mengembangkan pertanian, perikanan, perhutanan, dimana kemitraan dan keikutsertaan UKM dapat difasilitasi dengan berbagai proyek kerjasama;

- Investasi di bidang energi, termasuk di bidang bio-fuel yang juga akan difasilitasi melalui proyek kerjasama;
- Di bidang Jasa, aliran terbesar adalah di sektor keuangan dan asuransi, perdagangan, transportasi dan *real estate*;

6. *Movement of Natural Person* (pergerakan alami manusia)

Kedua belah pihak akan menyediakan kerangka ini, kerangka memudahkan perpindahan manusia di berbagai kategori termasuk pengunjung perusahaan jangka-pendek, intra-bisnis *transferences*, penanam modal dan servis professional. Di konteks sama, kedua belah pihak juga akan menyediakan penerimaan bagi jururawat maupun pengasuh. Kedua belah pihak juga akan menjalin kerjasama berhubungan maupun secara mendukung akan mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan hotel lapisan “Program Masa Magang Melatih dan Teknik yang Industri” menceritakan servis.

7. *Government Procurement* (Pengadaan Pemerintah)

IJEPA akan menyediakan kerangka untuk pertukaran informasi dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi kedua Pemerintah, sektor pribadi masing-masing dan organisasi relevan lain. Kedua pihak akan memajukan kerjasama teknik di bidang ini dengan pandangan untuk meningkatkan transparansi.

8. *Intellectual Property Rights* (Hak Milik Intelektual)

Pihak Jepang memandang hak milik intelektual (IP) sebagai elemen penting untuk memilih tujuan investasi mereka, dan perlu memperbaiki lingkungan Indonesia untuk perlindungan IP untuk promosi investasi oleh perusahaan Jepang. Pihak Jepang menegaskan pendapatnya sebagai berikut :

- (1) Perbaikan dan perlindungan sistem IP
- (2) Peningkatan Kerjasama Internasional
- (3) Meluruskan dan meningkatkan transparansi administrative procedure
- (4) Meningkatkan kesadaran umum atas perlindungan IP dan
- (5) Peningkatan palaksanaan.

Kedua pihak akan menjamin perlindungan memadai IP untuk memajukan efisiensi dan transparansi di administrasi IP, perlindungan sistem, dan memperhitungkan ukuran untuk pelaksanaan hak-hak milik intelektual melawan pelanggaran, memalsukan dan pembajakan. IJEPA akan menyediakan untuk kedua belah pihak untuk bekerjasama di hak bidang intelektual.

9. *Competition Policy* (kebijakan mengenai persaingan usaha)

Kedua belah pihak akan memajukan persaingan oleh menyapa kontrak aktivitas bersaing di wilayah masing-masing maupun bekerja sama dalam memperkuat kebijakan dan pelaksanaan undang-undang persaingan usaha, sesuai undang-undang dan peraturan masing-masing mereka.

Kedua belah pihak mempunyai pandangan atas pentingnya usaha yang sama dalam kebijakan persaingan usaha di bawah IJEPA. Pihak Jepang menekankan bahwa maksud diskusi dari kebijakan di bawah EPA akan mencegah aktifitas anti-persaingan di wilayah kedua negara yang menghalangi dari keuntungan liberalisasi dan investasi, sedangkan pihak

Jepang menunjukkan upaya meningkatkan standar usaha baik kerjasama pelaksanaan dan kerjasama teknik sebaliknya kedua negara kerjasama di bawah EPA yang mana Indonesia adalah salah satu negara yang paling maju diantara negara ASEAN dalam syarat-syarat usaha dalam persaingan dan kebijakan bidang usaha.

10. *Energy dan Mineral Resources* (Sumber Daya Energi dan Mineral)

Pihak Jepang menyebutkan bahwa bidang sumber penghasilan barang tambang dan energi, adalah bidang penting untuk Jepang, dan sebaiknya dibicarakan dalam IJEPA, yaitu : (a) perbaikan lingkungan investasi (b) mendapatkan sumber barang tambang dan energi dalam keadaan darurat. Pihak Jepang juga mengajak Indonesia untuk memperbaiki lingkungan investasi, dan pentingnya sumber barang tambang dan energi serta sumber daya manusia yang memadai dalam bidang ini.

Pihak Indonesia mengungkapkan bidang energi adalah satu bidang penting dalam kebanyakan bidang kerjasama IJEPA, dan kedua belah pihak akan memperkuat dialog kebijakan dan kerjasama dalam bidang ini. Menjelang habisnya masa kontrak perjanjian jual-beli gas alam cair (LNG) yang jatuh pada tahun 2010-2011, Jepang dan Indonesia melakukan lobi-lobi diplomatik. Bagi Jepang, posisi Indonesia sangat penting sebagai negara penyedia energi.

11. *Cooperation* (Kerjasama)

Kedua belah pihak akan meningkatkan kerjasama bilateral untuk pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembuatan Industri, pertanian, perikanan, dan kehutanan, perdagangan dan investasi, perkembangan sumber penghasilan, kepariwisataan, informasi dan teknologi komunikasi, servis

keuangan, usaha pengadaan pemerintah, lingkungan, dengan bertujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi di antara mereka.

4.3.4. Kesepakatan Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam IJEPA

Sesuai dengan salah satu sektor yang disepakati dalam perundingan kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam kerangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) adalah perdagangan dalam barang (*trade in good*) yaitu mengenai pengurangan atau penghapusan tarif terutama pada tarif tertinggi atau tarif eskalasi dan juga dalam hambatan non-tarif, ketentuan asal produk, penyelesaian dispute mengenai mutu barang. Di dalam suatu perdagangan antara Indonesia dengan Jepang memberlakukan tarif bea masuk dimana hamper semua pos tarif targetkan untuk segera dihapuskan.

Isu tarif terutama bea masuk dalam kerjasama IJEPA ini menjadi sangat penting dan akan menjadi peluang serta manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, dan juga akan memberi perluasan perdagangan dan kegiatan – kegiatan yang terkait dengan perdagangan antara kedua negara.⁴⁰ Kesepakatan pengurangan atau penghapusan tarif bea masuk yang disepakati diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu *fast-track*, dan pengecualian dengan memasang rambu-rambu tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatifnya terhadap industri domestik.⁴¹

⁴⁰http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-derlianani-26719-8-unikom_d-v.pdf diakses pada tanggal 5 Juni 2019 Pukul 15.03 WIB.

⁴¹ Sigit Setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”, dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2014/kajian/pkrb/03.%20Dampak%20IJEPA.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016 Pukul 15.10 WIB.

Untuk produk klasifikasi *fast-track*, persentase tertentu dari total pos tarif akan diturunkan ke 0 % pada saat berlakunya IJEP. Bagi produk klasifikasi *normal-track*, tarif diturunkan menjadi 0 % pada jangka waktu tertentu yang bervariasi dari minimal tiga tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi Jepang) atau 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya IJEP bagi persentase tertentu dari total pos tarif. Di samping konsesi tarif tersebut, diatur pula suatu skema konsesi tarif khusus bagi sektor-sektor industri tertentu dan kompensasinya melalui fasilitas pusat pengembangan industri manufaktur.⁴² Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Catatan-Catatan Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Indonesia
Jepang

Catatan	Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk
1	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. • Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. • Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.
2	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS).
3	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 15% pada tanggal implementasi. • 12% pada tanggal 1 Januari 2016.
4	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. • Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. • Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
5	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 20% pada tanggal implementasi. • 16% pada tanggal 1 Januari 2016.
6	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 10% pada tanggal implementasi. • 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA <

⁴² *Ibid.*

	IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
7	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. • Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari. • Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.
8	Tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 10% pada tanggal implementasi • 8% pada tanggal 1 Januari 2009 • 6% pada tanggal 1 Januari 2010. • 4% pada tanggal 1 Januari 2011 • 0% pada tanggal 1 Januari 2012
9	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. • Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari • Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011.
10	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. • Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari • Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
11	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 8% pada tanggal implementasi. • 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
12	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 8% pada tanggal implementasi. • 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016.
13	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 60% pada tanggal implementasi. • 20% pada tanggal 1 Januari 2012. • 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
14	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 45% pada tanggal implementasi. • 20% pada tanggal 1 Januari 2012. • 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
15	Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> • 40% pada tanggal implementasi.

- 20% pada tanggal 1 Januari 2012.
- 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.

Sumber: <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=IJEPA>

Perjanjian kemitraan IJEPA menyepakati pemberian keistimewaan tarif oleh kedua belah pihak. Dari pihak Indonesia, keistimewaan yang diberikan kepada Jepang adalah dengan memberikan perlakuan khusus tarif di 93 % dari jumlah pos tarif tahun 2006 yang sebanyak 11.163 pos tarif. Ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk produksi klasifikasi *fast-track*, sekitar 35 % dari pos tarif akan diturunkan hingga 0 % pada saat berlakunya IJEPA. Untuk produk klasifikasi *normal track*, sekitar 58 % dari pos tarif secara bertahap akan diturunkan menjadi 0 % dalam masa tiga hingga 15 tahun sejak berlakunya IJEPA. Sisanya yang 7 % merupakan produk yang dikecualikan dari pos tarif IJEPA.⁴³

Jepang memberikan kepada Indonesia perlakuan khusus tarif di lebih dari 90% dari pos tarif Jepang yang berjumlah 9.275 (tahun 2006). Ekspor Indonesia ke Jepang pada pos-pos tarif tersebut mencakup 90 % dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Untuk produk klasifikasi *fast-track*, sekita 80 % dari total pos tarif akan diturunkan ke 0% pada saat berlakunya IJEPA. Sementara itu, produk-produk dalam klasifikasi normal track sekitar 10 % dari total pos tarif akan diturunkan hingga 0 % secara bertahap dalm waktu tiga hingga sepuluh tahun sejak berlakunya IJEPA. Sedangkan 10 % sisanya akan dikecualikan dari skema tarif IJEPA.⁴⁴

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

4.3.5. Barang-Barang Yang Diturunkan Tarif Bea Masuk

1. Bidang Industri

Dalam bidang Industri, kedua belah pihak menyatakan minat untuk penghapusan tarif dalam beberapa bidang. Pihak Jepang menyatakan minat penurunan tarif pada barang-barang otomotif dan bagian-bagian otomotif, listrik, dan elektronik, baja, dan tekstil, yang mana pihak Indonesia menetapkan tarif yang cukup tinggi pada beberapa produk tersebut.

Perbaikan akses pasar di Jepang meliputi tarif di hampir seluruh barang impor dari Indonesia yang dilakukan mulai tahun 2010. Jepang juga berinisiatif untuk membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam Industri manufaktur.

Industri otomotif dan bagian-bagian otomotif Jepang menyatakan bahwa penghapusan tarif langsung pada prinsipnya diperlukan untuk memperkuat kerjasama dengan mitra lokal di Indonesia melalui kemitraan usaha dalam bentuk investasi serta divisi dilengkapi sistem kerja di bagian-bagian otomotif.

Pihak Indonesia menyatakan minat untuk penurunan tarif pada berbagai bahan kimia organik, kantong plastik, produk kaca, tekstil dan alas kaki, yang mana Jepang mempertahankan tarif serta kewajiban khusus yang signifikan pada beberapa produk.

2. Bidang Pertanian

Kedua negara sepakat untuk menurunkan tarif sebagian besar komoditi pertanian dalam jangka waktu 10 tahun. Komoditi-komoditi yang disepakati, yaitu; atas permintaan Jepang, Indonesia akan menghapuskan tarif pada komoditi anggur segar, apel segar, peach segar termasuk nektarines,

persimmon segar, sedangkan atas permintaan Indonesia, Jepang akan membuka pasarnya untuk buah-buah tropis seperti manga, manggis, rambutan, alpukat, durian. Namun untuk beberapa produk pertanian dikenakan *Tariff Rate uota* (TR), yaitu nanas dan pisang karena kedua produk tersebut masuk ke dalam kategori sensitive bagi Jepang.

Sebelum berlakunya EPA (*Economic Partnership Agreement*) Indonesia-Jepang, beberapa produk pertanian tertentu dari Indonesia tidak dapat menembus pasar Jepang karena produk tidak dapat memenuhi persyaratan standar produk Jepang termasuk kesehatan, sanitasi, dan standar phyto-sanitay. Pisang, nanas dan mangga merupakan contoh dari produk pertanian Indonesia yang mendapat keuntungan dari peningkatan pasar yang disediakan oleh EPA. Kerjasama IJEPA juga akan memberikan petani Indonesia bantuan teknis termasuk teknik pengobatan termal untuk pemberantasan lalat buah.

3. Bidang Perikanan

Pada bidang perikanan, menunjukkan bahwa kedua negara bersaing pada sumber daya perikanan terutama produk tuna dan ikan cakalang, kedua negara menyatakan prihatinan mereka bahwa liberalisasi perdagangan dapat mengancam pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan dan berpengaruh negative pada manajemen sumber daya perikanan, dan menyarankan bahwa akan lebih bermanfaat bagi kemitraan ekonomi kedua negara untuk lebih memperkuat yang ada hubungan kerja sama mengenai pengelolaan sumber daya perikanan.

Kedua belah pihak mengakui pentingnya mengambil langkah lebih jauh menuju diselenggarakan manajemen sumber daya perikanan, khusus untuk

menghilangkan *Illegal Unregulated dan Unreported (IUU) fishing* di sekitar perairan Indonesia. Kedua belah pihak mengakui pentingnya kerjasama untuk menyelidiki sumber daya perikanan di perairan Indonesia sebagai peluang bisnis masa depan di Indonesia.

4. Bidang Kehutanan

Pada bidang kehutanan, pihak Jepang menyatakan sensitivitas pada sektor panel kayu. Organisasi Jepang yang mewakili kepentingan kayu lapis, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan produsen papan serat menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi saat ini di mana daya saing produksi dalam negeri kayu lapis, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan papan serat menurun karena penurunan tarif.

4.4. Munculnya *Trend Bilateral Trade Agreement (BTA)* dan Perkembangannya

Sejak awal munculnya WTO awal tahun 1995 telah diselenggarakan lima kali Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura pada tahun 1996, kemudian yang kedua dilaksanakan di Jenewa pada tahun 1998, dan ketiga dilaksanakan di Seattle pada tahun 1999 dan KTM keempat dilaksanakan di Doha, Qatar pada tahun 2001. Sementara itu KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico pada tahun 2003.

KTM ke-4 diselenggarakan pada tanggal 9-14 Nopember 2001 yang dihadiri oleh 142 negara, yang didalamnya menghasilkan Deklarasi Menteri yang disebut juga Deklarasi Doha yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-

isu implementasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.⁴⁵

Deklarasi Doha tersebut mengamanatkan kepada para anggota yang mengikuti deklarasi untuk mencari jalan bagi tercapainya konsensus mengenai *Singapore Issues* yang mencakup isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi (*competition policy*), untuk mendapatkan transparansi dalam pengadaan pemerintah (*government procurement*), dan fasilitasi perdagangan. Namun perundingan mengenai isu-isu tersebut ditunda hingga selesainya KTM V WTO pada tahun 2003, jika terdapat konsensus yang jelas (*explicit concensus*) dimana para anggota menyetujui dilakukannya perundingan. Deklarasi tersebut juga memuat mandat untuk meneliti program-program kerja mengenai *electronic commerce*, negara-negara kecil (*small economies*), serta hubungan antara perdagangan, hutang dan alih teknologi.⁴⁶

Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (*Trade Negotiations Committee/TNC*) dan badan-badan dibawahnya (*subsidiaries body*). Selebihnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh *Councils* dan *Committee* yang ada di WTO.

Keputusan-keputusan yang telah dihasilkan KTM IV ini dikenal pula dengan sebutan "Agenda Pembangunan Doha" (*Doha Development Agenda*) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan

⁴⁵ Kementerian Perdagangan, *F.A.Q.*, diakses dari <http://www.kemendag.go.id/en/faq>

⁴⁶ Ibid.

repository.ub.ac.id

negara-negara berkembang paling terbelakang (*Least developed countries/LDCs*), seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO.⁴⁷

FTA dibentuk karena memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain terjadinya *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akibat adanya insentif-insentif karena terbentuknya FTA. *Trade diversion* biasanya terjadi akibat adanya insentif penurunan tariff, misalnya Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula hanya dari China, kemudian beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena menjadi lebih murah dan kemudian berhenti mengimpor gula dari China.

Ada beberapa substansi yang biasanya menjadi cakupan dalam FTA baik bilateral maupun regional yaitu antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, pergerakan tenaga kerja, *capacity building*, prosedur kepabeanan, hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya.

Dalam beberapa dekade terakhir, upaya integrasi ekonomi di berbagai kawasan melalui pembentukan *free trade agreement* dan *regional trading agreement* menjadi sebuah kecenderungan global. Integrasi ekonomi, selain sebagai sebuah akibat dari ketidakmampuan WTO, pesatnya pergerakan barang dan jasa, kebutuhan akses pasar yang lebih cepat dan besar, serta meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara, juga diarahkan untuk *me-leverage*

⁴⁷ Ibid.

kekuatan bidang ekonomi dan politik internasional di tengah persaingan global yang semakin kuat.⁴⁸

Sebagai bentuk pesatnya perkembangan FTA/EPA secara global, negara-negara membentuk FTA dengan negara yang secara geografis letaknya tidak berdekatan, dan juga dengan regional tertentu. Seperti misalkan EU-Mexico FTA, Korean-Chile FTA dan EU-south Africa FTA. Munculnya trend seperti ini berfungsi sebagai hubungan perdagangan dalam upaya menciptakan kondisi yang cocok dan saling menguntungkan bagi anggota FTA selain itu, FTA sebagai sarana untuk membuka lapangan kerja baru dengan menarik investasi dari negara anggota FTA serta menghapuskan hambatan-hambatan yang akan muncul apabila negara tidak membentuk FTA.

Di Asia telah banyak juga FTA yang berkembang. Perkembangan FTA di asia umumnya berbentuk kawasan atau negara dengan kawasan karena mayoritas negara di asia adalah negara berkembang dan cenderung memiliki masalah dan tantangan ekonomi yang hampir sama. Asean menjadi salah satu contoh sebuah kawasan yang mempunyai banyak perjanjian perdagangan secara bilateral. Selama perkembangannya, ASEAN secara kawasan maupun negara-negara anggota Asean telah membentuk beberapa perjanjian perdagangan dengan negara non-Asean seperti pembentukan Asean-China FTA pada tahun 2005, Asean-Korea FTA dalam perdagangan barang pada tahun 2007, Asean-Korean FTA (kecuali Thailand) dalam perdagangan barang pada tahun 2007.

⁴⁸ Kementerian Perdagangan, *Warta Ekspor* edisi Juli 2016 diakses dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6671486115504.pdf

Kemudian di negara-negara ASEAN, seperti contohnya Malaysia, yang telah melakukan FTA dengan Jepang terlebih dahulu dalam *the Malaysia-Japan Economic Partnership Agrrement* (MJEPA) yang mencapai kesepakatan pada tanggal 13 Desember 2005. Kemudian disusul dengan negoisasi bersama New Zealand sejak Mei tahun 2005 sehingga terjadilah puncak negoisasi FTA *The Malaysia-New Zealand FTA* (MNZFTA).⁴⁹

Kemudian negara Thailand yang juga melakukan berbagai perundingan untuk mencapai FTA dengan negara-negara lainnya sejak tahun 2002. Seperti *Thailand-Peru FTA* yang melakukan negoisasi bulan juli pada tahun 2002 dan mencapai puncak negoisasi pada tahun 2004 dan berlaku hingga tahun 2010. Kemudian dengan negara Jepang, Thailand memulai negoisasi bulan februari pada tahun 2004 dan mencapai puncaknya *Japan-Thailand Economic Partnership Agreement* (JTEPA) negoisasi pada tahun 2007. Tidak hanya Malaysia yang melakukan negoisasi FTA dengan New Zealand, tetapi Thailand juga melakukannya pada tahun 2005 dalam *New Zealand-Thailand Closer Economic Partnership Agreement* (ThaiNZCEP). Selain dengan negara New Zealand, Thailand juga mengupayakan FTA dengan Australia dalam *Australia-Thailand Free Trade Agreement* (TAFTA) dan dimulai pada bulan juli tahun 2004.⁵⁰

Negara Singapura melakukan berbagai negoisasi dengan beberapa negara. Seperti dengan negara Australia yang negoisasinya dimulai pada tahun 2000 dan puncaknya *Australia-Singapore Free Trade Agreement* (SAFTA) pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2004, Singapura melakukan negoisasi dengan negara

⁴⁹ <https://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/1760>

⁵⁰ <https://aric.adb.org/fta-country>

repository.ub.ac.id

Korea dalam *Korea-Singapore Free Trade Agreement* (KSFTA) dan berjalan sejak tahun 2005.⁵¹

Ditengah perkembangan dunia yang maju pesat, yang ditandai oleh kepentingan nasional tiap negara yang melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam proses negosiasi baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun regional, maka Indonesia juga harus dapat segera menentukan posisi dan menempatkan diri pada posisi yang tepat dan jelas. Politik luar negeri ditujukan untuk kepentingan nasional, Indonesia saat ini juga mempunyai rencana pembangunan nasional untuk memenuhi target tersebut.

Jumlah dari *Free Trade Agreement* dan *Economic Partnership Agreement* yang telah berjalan berkembang pesat di seluruh kawasan. Jumlah dari FTA/EPA yang telah berjalan yang sudah tercatat di WTO telah meningkat dari 27 pada tahun 1990 menjadi 474 di tahun 2010. Namun masih ada FTA/EPA yang masih belum tercatat di WTO. Peningkatan FTA/EPA yang sangat cepat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Kerjasama dalam perihal ekonomi dikawasan Asia Pasifik dapat dikategorikan sebagai sebuah kerjasama yang strategis, karena kawasan Asia Pasifik merupakan representasi dari 49 persen transaksi perdagangan dunia, GDP dikawasan ini mencapai 56 persen dari GDP dunia serta jumlah penduduk di kawasan Asia Pasifik mencapai 39 persen dari populasi penduduk dunia.⁵²

⁵¹ Ibid.

⁵²Warta Ekspor edisi Juli 2016 diakses dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6671486115504.pdf

BAB V

ANALISIS FAKTOR YANG MENDORONG INDONESIA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA IJEPA

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai faktor apa saja yang mendorong Indonesia dalam melakukan perjanjian kerjasama ekonomi *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) menggunakan analisis konsep *Bilateral Trade Agreement* yang dituliskan oleh Jayant Menon. Jayant Menon menjelaskan bahwa faktor pendorong yang melatarbelakangi sebuah negara melakukan kerjasama *Bilateral Trade Agreement* (BTA) dibagi menjadi dua yaitu faktor umum dan faktor spesifik. Sehingga pada bab ini dapat dilihat faktor mana yang paling dominan diantara kedua faktor tersebut.

5.1. General Factor

Faktor general merupakan faktor umum yang dapat melatarbelakangi dibentuknya BTA yang ada di dunia. Sehingga faktor berlaku bagi sebagian besar BTA yang sudah terbentuk ataupun yang masih direncanakan untuk dibentuk.

5.1.1. Kekecewaan Terhadap Institusi Multilateral

Kebijakan perekonomian Indonesia yang sedang dalam masa perbaikan dengan melakukan upaya-upaya peningkatan dengan cara mengikuti organisasi seperti WTO. Indonesia yakin bahwa dengan menjadi anggota WTO akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Hal tersebut

dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam negoisasi Doha Round. Melalui negoisasi tersebut Indonesia memiliki agenda yang sama dengan negara-negara lainnya yakni untuk mengusahakan liberalisasi perdagangan lebih lanjut.

Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan "*Uruguay Round*" (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "*General Agreement on Tariffs and Trade*" (GATT). WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 di antaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanaan terpisah. Saat ini, WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah "*Doha Development Agenda*" (DDA) yang dimulai tahun 2001.⁵³

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "*Most-Favored-Nation principle*" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.⁵⁴

⁵³https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto

⁵⁴ Ibid.

Terkait dengan DDA, KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian (*Agreement of Agricultural*), akses pasar produk bukan pertanian (*Non-Agricultural Market Access—NAMA*), perdagangan bidang jasa, dan Rules.⁵⁵

Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi (antara lain : *food security, livelihood security dan rural development*). Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dalam kebijakan pertanian mereka.⁵⁶

Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan NAMA. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan "*suspension*" pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008, diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan NAMA, dan menggunakan isu-isu *single-undertaking* seperti isu

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan tersebut juga mengalami kegagalan.⁵⁷

Tajamnya perbedaan negara maju dan negara berkembang membuat kesepakatan aturan main perdagangan bebas mengalami hambatan untuk mencapai sebuah mufakat. Lewat satu dekade belum ada kesepakatan antara negara anggota WTO yang mencapai titik tengah untuk kepentingan bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan setiap negara pasti berbeda-beda sehingga akan sulit jika disatukan dalam suatu forum. Bahkan setelah dua dekade, organisasi yang menaungi negara-negara di dunia tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.⁵⁸

Proses negosiasi *Doha Round* memang sangat rumit karena yang pertama adalah hampir semua negara ikut berpartisipasi. Kedua, keputusan yang diambil adalah berdasarkan consensus yang dimana harus semua negara setuju dengan satu keputusan, dengan kata lain disetujui atau dengan tidak sama sekali jika ada salah satu negara yang tidak menyetujuinya. Ketiga, setiap bagian yang dinegosiasikan dalam Doha Round merupakan bagian dari keseluruhan dan tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga tidak dapat disepakati secara terpisah atau dapat disebut sebagai single undertaking maka dari itu keputusan baru dapat disetujui ketika seluruh bagian negosiasi telah disepakati.

Dalam negosiasi Doha round ini ada 10 kategori yang menjadi pembahasan utama yang pertama adalah pembahasan sektor pertanian dimana ada pengurangan subsidi sebesar 2,5% dari nilai produksi untuk negara maju. Dan 6,7

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ FTA Efek "Noodle Bowl", diakses di aric.adb.org/database/fta pada 25 Juni 2019 pukul 10.20 WIB

% untuk negara berkembang. Kemudian yang kedua sektor non-agriculture dimana membahas mengenai pengurangan tarif impor untuk barang-barang selain produk makanan. Yang ketiga untuk sektor jasa dimana didalamnya membahas tentang penegakan regulasi produk jasa dari negara asing, dalam sektor ini negara membahas mengenai produk jasa apa saja yang dapat dijadikan sebagai komoditas perdagangan.

Perundingan dalam bidang pertanian di deklarasi Doha telah dimulai sejak bulan Maret tahun 2000. Sebanyak 126 anggota menyampaikan 45 proposal dan 4 dokumen yang membicarakan teknis tentang teknis perundingan seharusnya dilaksanakan. Tercatat dalam deklarasi Doha dimulai lebih lanjut mengenai beberapa bidang tidak hanya pertanian saja tapi juga membahas bidang lainnya. Keberhasilan dari negara-negara berkembang dan negara eksportir bagi produk pertanian adalah dengan adanya putusan mengenai “pengurangan” atau kemungkinan adanya penghapusan sebagai bentuk subsidi ekspor. Keputusan lainnya yang tidak kalah penting yakni adanya kemajuan dalam hal akses pasar, pengurangan jumlah program dukungan/subsidi domestik yang dapat mengganggu jalurnya perdagangan (*trade-distorting domestic support programs*).⁵⁹

Gagasan pemikiran yang diutarakan oleh kelompok negara *emerging market* sangat berbeda dengan rancangan pemikiran negara maju. Permintaan kelompok negara *emerging market* adalah pemangkasan hambatan dagang yang lebih besar dan lebih baik, mengurangi subsidi pertanian bagi negara maju dan subsidi terhadap produk makanan oleh negara barat sehingga produk makanan

⁵⁹ Ibid.

yang dihasilkan menjadi murah dan efeknya membanjiri pasar dunia.⁶⁰ Proses negosiasi pada pertemuan selanjutnya juga menjadi lambat, karena pembahasan tentang agriculture belum dapat disepakati, sektor *agriculture* ini menjadi isu yang sangat sensitif bagi negara sehingga dirasa sulit untuk dapat disepakati.

Secara umum negosiasi Doha Round WTO belum bisa disepakati karena banyak aspek yang menjadi pertentangan antara negara maju dan negara berkembang dimana negara maju menginginkan adanya liberalisasi ekonomi secara menyeluruh kepada semua negara anggota WTO sementara negara berkembang masih belum bisa menyesuaikan dengan standar yang diinginkan oleh negara maju. Kegagalan dari negosiasi Doha Round membuat negara-negara lebih memilih untuk *bilateral trade agreement* ataupun *regional free trade agreement* selain dikarenakan lebih mudah untuk disepakati, negara dapat memilih mitra kerjasama yang sesuai dengan standard serta kemampuan yang dimiliki.

Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G-33, G-20, NAMA-11, yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian *development objectives* dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan

⁶⁰ Ibid

intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral.⁶¹

Indonesia selaku koordinator G-33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan Duta Besar/*Head of Delegations, Senior Official Meeting* dan Pertemuan Tingkat Menteri; baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G-33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian; anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 negara.⁶²

Perundingan di Seattle pada tahun 1999 dan perundingan di Cancun tahun 2003 yang melibatkan negara Amerika dan Eropa gagal dalam melakukan perundingan tersebut. Dua negara tersebut gagal untuk memasukkan kepentingan agenda liberalisasi mereka diluar aspek perdagangan barang dan jasa. Penolakan tersebut berasal dari negara berkembang anggota WTO. Sedangkan aspek lainnya dikenal dengan sebutan “Isu Singapura”, yang tentu saja didalamnya terdapat isu-isu yang utama yaitu isu investasi, isu pengadaan barang oleh pemerintah, isu kebijakan kompetisi serta perdagangan anti monopoli, dan isu *trade facilitation*. Akibat hal ini, negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa mendesak dalam

⁶¹ <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/multilateral/tentang-wto/sekilas-wto>

⁶² Ibid.

perundingan FTA untuk kepentingannya dapat diterima. Namun yang terjadi adalah penolakan keras dari negara-negara berkembang lainnya.⁶³

. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO di Cancun, Mexico tahun 2003 tidak mengeluarkan deklarasi yang substantif dikarenakan gagal dalam menyepakati konsensus, terutama dalam draft teks agrikultur, akses pasar produk non pertanian (MANAP) dan Singapore *Issues*. Hal ini disebabkan perundingan munculnya *joint paper* AS-UE, proposal Group 20 yang menentang proposal gabungan AS-UE dan proposal Group 33 yang menghendaki konsep *special product* dan *special safeguard mechanism*.⁶⁴

Secara singkat, *joint paper* AS-UE antara lain memuat proposal yang menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi (tarif peak) di negara maju. Sebaliknya, negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik (*domestik support*) dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha.⁶⁵

Sementara itu, kelompok negara-negara berkembang lainnya yang tergabung dalam Group 33 adalah group yang dimotori Indonesia dan Filipina mengajukan proposal yang menghendaki adanya pengecualian dari penurunan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ <https://macrougm.wordpress.com/2014/12/25/putaran-doha/> diakses 21 Oktober 2019

⁶⁵ Ibid.

repository.ub.ac.id

tarif, dan subsidi untuk *Special Products* (SPs) serta diberlakukannya *Special Safeguard Mechanism* (SSM) untuk negara-negara berkembang.⁶⁶

Dengan kegagalan negosiasi di tingkat multilateral kemudian membuat Indonesia untuk mengejar agenda liberalisasinya melalui *Free Trade Agreement* dengan negara lain seperti Jepang Dengan bentuk perjanjian yang bilateral tentu akan lebih mudah bagi Jepang untuk bernegosiasi dibandingkan di tingkat multilateral. FTA dengan negara-negara tersebut tidak mengharuskan Indonesia mengurangi subsidi di sektor pertanian dan juga Jepang tetap dapat melindungi industri pertanian dalam negeri dengan tidak menerapkan bebas tarif bagi produk pertanian bagi negara-negara tersebut.

5.1.2. *Domino Effect*

Dalam beberapa dekade terakhir, upaya integrasi ekonomi di berbagai kawasan melalui pembentukan *free trade agreement* dan *regional trading agreement* menjadi sebuah kecenderungan global. Integrasi ekonomi, selain sebagai sebuah akibat dari ketidakmampuan WTO, pesatnya pergerakan barang dan jasa, kebutuhan akses pasar yang lebih cepat dan besar, serta meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara, juga diarahkan untuk menaikkan kekuatan bidang ekonomi dan politik internasional di tengah persaingan global yang semakin kuat.⁶⁷

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Kementrian Perdagangan, *Warta Ekspor* edisi Juli 2016 diakses dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6671486115504.pdf

Semakin merebaknya perkembangan FTA/EPA secara global, negara-negara membentuk FTA dengan negara yang secara geografis letaknya tidak berdekatan, dan juga dengan regional tertentu. Di kawasan Asia-Pasifik sendiri, telah banyak juga FTA yang berkembang. Terutama perkembangan FTA di ASEAN yang umumnya berbentuk kawasan atau negara dengan kawasan karena mayoritas negara di ASEAN adalah negara berkembang dan cenderung memiliki masalah dan tantangan ekonomi yang hampir sama.

Meluasnya FTA malah menimbulkan efek yang cukup mengkhawatirkan yakni adanya tumpang tindih perjanjian kerjasama atau kesepakatan yang terjalin yang kemudian dikenal dengan sebutan efek "*noodle bowl*". Efek ini dapat membingungkan bagi yang menjalani suatu kerjasama dengan beberapa negara dan mengalami tumpang tindih dalam setiap kebijakan yang diambil dari perjanjian kerjasama tersebut.

Selain itu, efek tersebut dapat menimbulkan penghambatan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah. Sehingga ketika kecenderungan mengikat, maka perjanjian atau kesepakatan tersebut akan semakin sulit dipenuhi dan dijalani oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di suatu negara yang tentu saja dari segi kapasitas dan standart mereka berbeda. Efek tersebut timbul dengan predikat negatif akibat meluasnya FTA yang cenderung pesimistis.⁶⁸

Pada tahun 2002 Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama antar negara. Indonesia meratifikasi pembentukan FTA dengan negara-negara yang tergabung di negara ASEAN. dalam perkembangannya, AFTA juga melakukan pembentukan forum FTA pada tahun 2004 dengan negara China (ACFTRA),

⁶⁸ Ibid.

kemudian pada tahun 2007 dengan negara Korea (AKFTA). Indonesia juga melakukan perjanjian dengan India (AIFTA) pada tahun 2010, dan juga dengan negara Australia dan New Zealand (AANZFTA). Terakhir yaitu perjanjian dengan negara Jepang (AJCEP). Namun, untuk yang bersifat secara bilateral, Indonesia baru membentuk bilateral FTA dengan Jepang dalam IJEPA.

5.1.3. BTA Cenderung Tidak Terlalu Menarik Perhatian Publik

Faktor general ini berbicara tentang kurangnya perhatian masyarakat yang tidak setuju akan perjanjian perdagangan bebas. Faktor eksternal ini dapat dilakukan oleh pengusaha menengah atau masyarakat menengah ke bawah yang pasti terkena dampak dari *free trade*.

Beberapa faktor dibawah ini merupakan faktor atau alasan tiap negara melakukan berbagai perjanjian perdagangan bebas, antara lain:⁶⁹

1. Melengkapi kebutuhan negara dalam hal pemenuhan barang dan jasa;⁷⁰
2. Untuk meningkatkan keuntungan dan pendapatan negara
3. Karena adanya perbedaan secara geografis, iklim, suhu, sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, serta jumlah penduduk yang menjadi penyebab dalam adanya perbedaan dalam produksi barang atau jasa yang dibutuhkan setiap negara.
4. perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi; dan/atau

⁶⁹ Bdk. Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, 3rd ed., (Newark, New Jersey: LexisNexis, 2008), hal. 201-240

⁷⁰ Frank Garcia, *Global Justice and International Economic Law: Three Takes*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hal. 223

5. di Era globalisasi yang menyebabkan setiap negara tidak bisa hidup sendiri. Indonesia menyepakati perdagangan bebas untuk meningkatkan perekonomian perindustrian dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara.

Dalam melakukan suatu perjanjian internasional, baik dalam bidang perdagangan atau dalam bidang lainnya, pasti memiliki dampak pada negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Dampak positif pertama, adalah terdorongnya pertumbuhan ekonomi. Kedua, adalah lebih eratnya hubungan antar bangsa dan antarnegara karena dengan hal tersebut setiap negara akan merasa saling membutuhkan demi terciptanya masa depan yang baik dan menjalin persahabatan.⁷¹

Ketiga, terciptanya banyak lapangan pekerjaan. Tentu saja dengan adanya perjanjian perdagangan di antar negara, setiap negara yang mengekspor akan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. Karena setiap peningkatan produksi pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga hal tersebut saling berkaitan. Perusahaan-perusahaan besar akan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi tenaga kerja yang setiap tahunnya pasti bertambah banyak dan memberikan cukup banyak keragaman lapangan pekerjaan dengan kebutuhan perusahaan yang disesuaikan terutama negara Indonesia..⁷²

Keempat, dari segi devisa negara dapat memberikan banyak keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional tentu pendapatan negara akan

⁷¹ Lih. misalnya An Chen, "Trade as the Guarantor of Peace, Liberty and Security" dalam Wenhua Shan, Penelope Simons dan Dalvinder Singh (eds.), *Redefining Sovereignty in International Economic Law*, (Portland: Hart Publishing, 2008), hal. 87-145

⁷² Ibid.

bertambah dan meningkatkan devisa negara. Perusahaan-perusahaan dalam bidang industri apapun akan meningkatkan produksi agar dapat emncapai hasil maksimal.

Kelima, memperoleh keuntungan dari spesialisasi barang. Indonesia misalnya, memproduksi sepeda begitu pula dengan India, namun hasil produksi di Indonesia lebih baik secara kualitas daripada negara India, sehingga Indonesia diberikan spesialisasi produksi sepeda.

Keenam, dengan adanya perdagangan internasional dapat menjadikan jembatan bagi transfer teknologi yang efisien. Di dalam aktifitas perdagangan internasional dapat memberikan pelajaran bagi para produsen dan perusahaan-perusahaan untuk mempelajari dan bertukar ilmu mengenai teknik produksi yang lebih canggih dan efektif serta efisien dari negara lain dengan kemajuan teknologi yang pesat dan dipraktikkan dalam negeri. Hal itu dapat membantu meningkatkan kualitas produksi serta meningkatkan secara kuantitas.

Ketujuh, selain pengaruh produksi dan kemajuan teknologi, perdagangan internasional dapat juga menjadi pencegah terjadinya krisis di negara tersebut.⁷³ Perdagangan internasional bermanfaat untuk mencegah terjadinya krisis yang melanda suatu negara. Jika Indonesia gagal panen padi dalam skala besar, maka krisis pangan dapat teratasi dengan mengimpor beras.

Kedelapan, dalam kegiatan perdagangan internasional dapat menstabilkan rasionalisasi harga produk-produk di setiap negara dengan mempertimbangkan biaya produksi. Dengan perdagangan internasional dapat mengimpor barang dari

⁷³ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Lintas Negara, Kemenkumham, 2018, hlm. 7-8

luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah sehingga dapat mengambil keuntungan daripada memproduksi produk sendiri namun biayanya lebih mahal. Kesembilan, dengan perdagangan internasional dapat menjadikan kegiatan ekonomi lebih pesat di suatu negara. Artinya, setiap negara yang melakukan perdagangan internasional akan aktif dalam kegiatan produksi, mengimpor, dan tentu saja berdampak pada semua lini. Keuntungan negara atau devisa negara, lapangan pekerjaan, produksi yang semakin cepat dan berkualitas, dan para pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan lebih banyak daripada yang tidak melakukan perdagangan internasional.

Pertama, ketergantungan pada tiap-negara tersebut akan semakin besar. Dampak tersebut sangat terlihat nyata karena perdagangan internasional menyebabkan ketergantungan pada negara-negara yang lebih mampu dalam segi produksi, tenaga kerja, dan sumber dayanya yang kualitasnya jauh lebih baik. Hal tersebut menimbulkan ketergantungan dan mengagungkan produk-produk luar negeri daripada produk lokal yang pastinya juga berdampak pada produsen lokal.⁷⁴ Akibatnya timbul ketergantungan pada negara lain, terutama bagi negara yang tidak bisa melakukan produksi di dalam negeri.

Kedua, timbulnya isu penjajahan dalam bidang ekonomi. Hubungan dalam perdagangan internasional dapat dijadikan sebuah alasan bagi suatu negara untuk menekan negara lainnya dan dapat dijadikan sebagai alat yang strategik untuk mengatur sebuah negara. Hal tersebut dapat dilakukan oleh negara yang dikatakan cukup pesat dan maju dari segi ekonomi kepada negara yang masih bergantung

⁷⁴ Ibid.

pada negara lainnya. Sehingga yang awalnya hanya bergantung dalam bidang ekonomi, dapat merambah ke bidang lainnya. Dalam bidang keamanan misalnya.

Ketiga, perdagangan internasional dalam pelaksanaannya rentan menjadi perdagangan bebas yang lebih menguntungkan negara-negara maju. Keempat, mengenai adanya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. mengapa dikatakan begitu, karena kegiatan perdagangan internasional yang selalu meningkatkan proses produksi suatu barang atau jasa akan membutuhkan pekerja yang kualitasnya baik pula. Dengan hal tersebut eksploitasi sumber daya manusia akan terjadi. Hal tersebut juga terjadi kepada sumber daya alam yang dihabiskan demi memenuhi kebutuhan negara-negara yang bekerjasama. Hal itu dapat berdampak jangka panjang, yaitu negara tersebut dapat miskin dari kekayaan alam yang nantinya akan berakhir dengan mengimpor dari negara lain dan tidak mengekspor lagi. Contoh dalam negeri Indonesia saja, dulu Indonesia terkenal dengan pengekspor minyak, namun saat ini yang terjadi adalah kebalikannya. Indonesia mengimpor minyak dari negara lain.

Kelima, timbul persaingan dan perpecahan antar negara. Dampak yang jelas terlihat adalah negara-negara pengimpor yang berebut negara tujuan ekspor.⁷⁵ Namun, tidak hanya beberapa dampak negatif saja yang dirasakan Indonesia. Masyarakat menengah pun merasakan bagaimana dampak danya perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia. Akan tetapi, adanya kritik dari kelompok masyarakat sipil, Akademisi yang menyuarakan untuk

⁷⁵ Ibid., hlm 10.

mempertimbangkan kembali negoisasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan *free trade agreement*.⁷⁶

Banyak kritik tidak hanya dari kelompok masyarakat sipil, tetapi juga akademisi dan UN *Human Rights Experts*, yang menyuarakan keprihatinan tentang fakta bahwa kebijakan yang mengatur liberalisasi ekonomi sering dirumuskan dan dinegosiasikan dengan cara-cara nonpartisipatif dan sangat tidak transparan, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diterima. Proses negosiasi FTA berlangsung di balik pintu tertutup dengan sedikit akses untuk masyarakat sipil dan jutaan orang yang akan terkena dampak langsung oleh penawaran ini, menyebabkan 'defisit demokrasi' dan menjadi ancaman bagi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.⁷⁷

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang ekonomi ini melalui proses perundingan yang cukup panjang. Berbeda dengan negara-negara Asia lainnya, Jepang melakukan perundingan dengan Indonesia dimulai pada Februari tahun 2004 kemudian disepakati April tahun 2008. Sedangkan perjanjian kerjasama ini diinisiasi oleh Jepang dengan mengajukan proposal pembentukan oleh Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi kepada Presiden Megawati ketika Presiden Megawati mengunjungi Tokyo pada tanggal 22-25 Juni 2003. Kemudian perundingan resmi yang disetujui oleh Indonesia saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Jepang pada bulan Juni tahun 2005. Pada tanggal 20 Agustus 2007 Perdana Menteri Jepang Shinjo Abe datang ke Indonesia untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menandatangani surat

⁷⁶ Paskalia Sabtaliani Sandori, *Kerugian Indonesia Dalam Kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*, 2011, hlm 5

⁷⁷ Op. Cit., *Mega-FTA, Rezim Baru Perdagangan Bebas*, hlm. 3



persetujuan kerjasama tersebut dan dijalankan secara resmi pada tahun 2008.⁷⁸ Proses negosiasi yang tidak terbuka dan minimnya pemberitaan di media Indonesia membuat masyarakat sedikit acuh terhadap perundingan yang memunculkan perjanjian BTA antara Indonesia dan Jepang tersebut.

Kritikan masyarakat sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah Indonesia kurang begitu besar sehingga tidak membuat pemerintah mempertimbangkan kembali untuk melakukan perdagangan bebas. Karena ketimpangan teknologi, kemandirian perekonomian, dan berbagai hal lainnya Jepang lebih maju daripada negara Indonesia membuat perjanjian perdagangan ini bisa saja memberikan dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya membuat sekelompok kecil masyarakat hanya bisa menyuarakan dengan suara kecil.

5.1.4. Motif Politik

Motivasi politik tidak dapat dilepaskan dalam perilaku dan sebuah keputusan yang diambil oleh sebuah negara, sehingga motif politik masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan negara membentuk BTA dengan negara lain.

Terbentuknya IJEPA karena inisiasi dari Jepang yang menyodorkan proposal kerjasama kepada Indonesia. Hubungan Bilateral dimulai dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 yang saat itu fokus terhadap stabilitas ekonomi Indonesia dengan stabilitas politik dan keamanan,

⁷⁸ Refida Dyah Arishanti, *Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia di Bawah Kerjasama Bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2019

serta kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan. Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menjaga citra Indonesia yang saat itu tidak memiliki suatu permasalahan secara politis dengan negara lain dan sanggup menjaga keamanan negara.⁷⁹

Kondisi politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi beberapa kondisi :⁸⁰

1. Terbatasnya kemampuan secara nasional dalam mencari solusi atas krisis ekonomi, yang telah mempertajam permasalahan politik dan sosial di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dapat mengusahakan mobilitas dukungan ekonomi internasional. hal tersebut merupakan hal yang perlu dan wajib dilakukan atau diupayakan dalam pemerintahan. Indonesia harus dengan segera dapat mengubah iklim yang awalnya tidak kondusif menjadi iklim yang kondusif guna mendapatkan kembali investasi asing yang awalnya enggan masuk karena adanya ketidakpastian hukum di Indonesia.
2. Negara Indonesia harus menghentikan adanya kesalahan pemahaman Internasional mengenai gerakan terorisme internasional yang saat itu sedang merebak di seluruh negeri. Indonesia harus terus mengupayakan mendapatkan dukungan demi keutuhan negara dan bangsa dari berbagai ancaman dan berbagai masalah mengenai otonomi daerah. Dalam hal ini politik luar negeri menjadi peran penting untuk dapat mencegah internasionalisasi dari isu separatisme. Untuk menegaskan dukungan dari internasional bahwa penegasan

⁷⁹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-pertumbuhan-sby> diakses pada tanggal 8 Juni 2019

⁸⁰ Rana Shofi Inayati, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Politik Luar Negeri Indonesia, 2014, hlm 2

- wilayah negara Indonesia harus dilakukan. untuk memelihara kepercayaan kepada politik dan keamanan dan seluruh kawasan hal ini akan terus dilakukan.
3. Posisi yang cukup kuat yang didapat Indonesia di kawasan, Indonesia dalam memainkan peran dalam lingkup ASEAN harus dipertahankan guna tetap mendapatkan posisi tawar untuk meningkatkan kerjasama serta dukungan internasional. Indonesia harus berperan lebih aktif untuk mendukung pembentukan suatu komunitas regional di kawasan Asia Pasifik. Yang dalam hal ini telah diperkuat ASEAN melalui sebuah pengakuan terhadap suatu aturan ketertiban di kawasan. Di bidang politik keamanan dengan ASEAN *Regional Forum* (ARF) dan dari segi ekonomi melalui APEC yang merupakan sebuah langkah dalam institusi untuk membentuk suatu komunitas yaitu CSCAP (*Centre For Strategic And International Studies*) dan PECC (*Pacific Economic Cooperation Council*).
 4. Kepiawaian dalam melakukan diplomasi dalam era globalisasi tidak mampu untuk meningkatkan citra sebuah negara apabila dalam kondisi negara itu sendiri masih berada dalam kondisi yang tidak baik atau dapat dikatakan negara tersebut sedang dalam kondisi yang kurang kondusif. Maka dari itu, penyusunan untuk skala prioritas demi memaksimalkan segala sumber daya. Hal tersebut harus dilakukan dan diutamakan pada upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan nasional dan regional yang aman dan stabil sangat diperlukan pada pemerintahan.

Dengan melakukan perundingan dengan Jepang, membuat hubungan diplomatik Indonesia semakin membaik. Arus politik yang saat itu sedang bergejolak karena adanya pemilihan umum tidak memberikan pengaruh kepada

Jepang untuk berinvestasi di Indonesia.⁸¹ dengan mempercepat proses negoisasi dengan Jepang dapat meningkatkan keberhasilan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sektor ekonomi dengan target peningkatan konsumsi masyarakat dan kegiatan ekspor impor Indonesia dengan Jepang dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 mencapai 5,9 persen dan tumbuh pada tahun 2010 menjadi 6,1 persen.

Ditengah perkembangan dunia yang maju pesat, yang ditandai oleh kepentingan nasional tiap negara yang melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam proses negosiasi baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun regional, maka Indonesia juga harus dapat segera menentukan posisi dan menempatkan diri pada posisi yang tepat dan jelas. Dalam melakukan politik negeri harus memiliki tujuan dan kepentingan nasional, Indonesia saat ini juga mempunyai rencana pembangunan nasional untuk memenuhi target tersebut. Jika tidak segera menentukan posisi yang tepat, maka Indonesia dapat terombang ambing di antara perdebatan berbagai kepentingan masing-masing negara tersebut dan tentunya saling bertolak belakang. Indonesia harus menentukan target jangka pendek dan jangka panjang untuk dapat menentukan posisi yang paling tepat. Penentuan target tersebut bertujuan untuk mencari tahu biaya dan manfaatnya lebih terukur dan transparan. Sedangkan, ada yang lebih penting yaitu bagaimana menyatukan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia dan mencapai target dengan langkah-langkah yang di tempuh di tingkat internasional.

⁸¹<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082925-99-6870/kebijakan-ekonomi-pro-pertumbuhan-sby> diakses pada tanggal 8 Juni 2019

5.2. *Specific Factor*

Faktor yang kedua adalah faktor spesifik yang terbagi menjadi tiga indikator yang didalamnya terbagi menjadi beberapa sub-indikator. Dalam penelitian ini penulis ingin menjelaskan terkait faktor spesifik yang menjadi pendorong Indonesia melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang dalam IJEPA.

5.2.1. **Faktor Ekonomi**

Perekonomian Indonesia dilanda krisis dengan berbagai bentuk. Mulai dari kesenjangan sosial yang dapat menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan tanggap dan sigap. Krisis tersebut telah mencuat ke permukaan dengan menunjukkan beberapa kelemahan ekonomi Indonesia. Berbagai kejadian terjadi yang melemahkan ekonomi Indonesia dan mempengaruhi ketahanan ekonomi secara nasional. Tidak meratanya penyebaran pembangunan yang membuat masing-masing daerah di Indonesia semakin jauh perbedaannya. Apalagi antar kota dan antar pedesaan. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan di Indonesia sangat berbeda jauh antara kawasan barat dan timur Indonesia, pemerataan kondisi sosial masyarakat juga sangat umum terjadi di setiap negara. Dengan terjadinya hal-hal tersebut, langkah untuk menstabilkan perekonomian dan pemerataan pembangunan gencar dilakukan pada permulaan tahun 2000. Dengan optimisme yang cukup tinggi pemulihan ekonomi dapat terjadi.⁸²

Pemulihan ekonomi Indonesia telah gencar dilaksanakan sejak triwulan ke III pada tahun 1999 hingga awal tahun 2000-an. Penstabilan terus berlangsung

⁸² Visi Indonesia 2020, Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional, 2011

bersamaan dengan pembangunan dan menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat meskipun itu sulit untuk dilakukan. Pertumbuhan ekonomi pada saat itu untuk menciptakan ribuan lapangan pekerjaan bagi calon pekerja yang terus meningkat terus setiap tahunnya. Akan tetapi, usaha yang terus dilakukan untuk penstabilan ekonomi belum diimbangi dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat itu. Permasalahan yang mendasar menjadi alasan masyarakat belum bisa percaya sepenuhnya kepada pemerintah untuk dapat mengembalikan perekonomian yang baik dan kondisi negara yang kondusif. Dengan dukungan investasi asing yang rendah, serta dukungan pihak swasta yang tidak semuanya berjalan dengan lancar, karena gejolak politik luar negeri yang belum dapat kembali pulih dengan baik, restrukturisasi ekonomi dan pembangunan belum berjalan secepat yang diharapkan.⁸³

Berdasarkan pada data PDB Indonesia tahun 2004-2007 menurut harga konstan kecenderungan mengalami peningkatan yang juga dibarengi peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah, sehingga ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah baik. Kekuatan di sektor keuangan ini dikarenakan adanya kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, hal ini telah dibuktikan dengan meningkatnya ekspor Indonesia lebih besar daripada impornya. Berikut adalah produk domestik menurut jenis pengeluaran :

⁸³ Ibid.

Tabel 5.1

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Menurut Jenis Pengeluaran,
2004 - 2008 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2004	2005	2006	2007
Atas Dasar Harga Konstan 2000				
PDB Menurut Pengeluaran	1,656,516.8	1,750,656.1	1,846,654.9	1,963,974.3
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,004,109.0	1,043,805.1	1,076,928.1	1,130,847.1
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	126,248.7	134,625.6	147,563.7	153,309.6
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	354,865.7	393,177.8	404,606.6	441,614.1
Perubahan Inventori	25,099.1	18,652.1	13,095.1	16,911.9
Diskrepansi Statistik 1)	8,757.2	4,319.8	24,035.7	56,986.9
Ekspor Barang-Barang dan Jasa	680,621.0	791,995.9	864,503.5	937,849.2
Dikurangi: Impor Barang- barang dan Jasa	543,183.8	635,920.1	684,077.8	756,348.3
Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi	-80,468.1	-107,381.7	-115,452.1	-116,241.2
Produk Nasional Bruto	1,576,048.7	1,643,274.4	1,733,435.4	1,847,733.1
Dikurangi: Pajak Tidak Langsung Neto	46,040.6	34,580.2	55,422.1	56,308.9
Dikurangi: Penyusutan	82,825.8	87,532.8	92,332.7	98,198.7
Pendapatan Nasional	1,447,182.2	1,521,161.4	1,583,447.9	1,693,225.5

Sumber : Pendapatan Nasional Indonesia, BPS

Indonesia turut aktif dalam berbagai perjanjian internasional yang tentu saja dibutuhkan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Dalam perjanjian tersebut juga diikuti oleh beberapa negara sehingga Indonesia juga harus mampu mengendalikan sistem negara dan juga pengimplementasian kesepakatan di negara Indonesia sendiri untuk menghindari ancaman-ancaman yang dapat menyerang Indonesia kapanpun. Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang untuk menghindari efek negatif dari sebuah kesepakatan. Perjanjian internasional tersebut seperti ASEAN, WTO, dan APEC yang tentu saja didalamnya terdapat negara-negara yang masih berkembang dalam segala bidang maupun negara yang sudah maju dari teknologi dan ekonomi yang dapat berdiri secara mandiri yang saling mempunyai

kepentingan memajukan negaranya masing-masing. Ancaman terhadap ketidaksinambungan anggaran negara dapat terjadi dalam proses implementasi kesepakatan yang dapat menjadi sebuah faktor atas ketidakpastian dari sebuah stabilitas perekonomian.

Krisis ekonomi global yang menyebabkan tekanan bagi kinerja ekspor Indonesia selama kurun waktu tahun 2008-2009 yang menyebabkan penurunan dalam bidang ekspor barang dan jasa sebesar 17,3% pada semester I. Berkebalikannya pada kurun waktu 2005-2007 pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi penting pada bidang barang dan jasa yang meningkat rata-rata 2% per tahun. Hal itu dapat dirasakan oleh Indonesia karena penekanan pertumbuhan ekonomi akibat ketidakstabilan investasi dan pasar dunia.⁸⁴ Berikut penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.
Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Pertumbuhan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia 2005-2007 (persen)

Uraian	2005	2006	2007
Nilai Ekspor	18,8	19,7	15,7
Pertanian	15,4	18,2	7,4
Industri	14,2	16,7	17,8
Pertambangan	67,1	40,9	6,1
Indeks Harga Komoditas Ekspor	12,6	33,8	10,6
Pertanian	13,4	35,7	9,5
Industri	26,6	50,3	2,8
Pertambangan	-2,8	9,9	26,1

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

Jika dilihat pada tabel diatas, terdapat satu kendala yang dialami untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Saat ini permintaan sektor nonmigas diperkirakan masih akan melemah hingga tidak diketahui waktunya. Kondisi

⁸⁴ Bappenas, Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas, 2010, diakses di bappenas.go.id



tersebut juga berdampak pada lemahnya pasar dan permintaan pasar secara global dan lesunya pasar utama Indonesia. Terutama pada negara Amerika, Uni Eropa, dan Jepang yang telah menurunkan permintaan pasar terutama pada bidang tekstil sebagai ekspor-ekspor utama Indonesia. Kemudian, produk logam, dan produk yang digunakan untuk bahan baku produksi di industri negara tersebut. meskipun terjadi penurunan nilai ekspor, pada tahun 2008 masih mengalami pertumbuhan di sektor non migas.⁸⁵

Dalam periode tahun 2005 sampai tahun 2007 ekspor non migas berperan dengan rata-rata sebesar sebesar 78,1 persen, yang didapat dengan peningkatan dari total ekspor. Pencapaiannya tersebut juga diimbangi dengan penurunan yang mencapai 55,4% pada periode yang sama. Hal tersebut terjadi karena menurunnya ekspor non migas yang cukup signifikan. Berikut penjelasan pada tabel dibawah ini :⁸⁶

Tabel 5.3.
Peranan Ekspor Nonmigas Terhadap Ekspor
Total Periode Tahun 2004-2007

Uraian	2004	2005	2006	2007
Kontribusi Terhadap Ekspor (%)				
Total Ekspor	100	100	100	100
Ekspor Nonmigas	78,1	77,5	79,0	80,6
Pertanian	3,5	3,4	3,3	3,2
Industri	68,0	64,9	64,5	67,0
Pertambangan	6,7	9,3	11,1	10,4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari tabel diatas, Indonesia telah melakukan segala upaya untuk diversifikasi pasar tujuan ekspor dengan keragaman jenis barang dan jasa dan telah menunjukkan hasil.

⁸⁵ Ibid. Hlm. 7

⁸⁶ Ibid. 17

Di sisi lain, pangsa pasar ekspor tradisional semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2004 pangsa ekspor tradisional tumbuh di angka 53,9%. Kemudian menurun di angka 49,3% pada tahun 2007. Berbeda dengan pangsa ekspor non tradisional, pada tahun 2004 menunjukkan kenaikan dari 46,1% menjadi 50,7% pada tahun 2007. Berikut penjelasan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.4.
Pangsa Pasar Ekspor Nonmigas di Pasar Ekspor Tradisional dan Nontradisional Periode Tahun 2004-2007*)

Uraian	2004	2005	2006	2007
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)				
Dunia	55.939,300	66.428,40	79.589,10	92.012,30
Total Pasar Ekspor Tradisional	30.147,900	35.458,50	41.575,50	45.368,50
Amerika	8.272,100	9.507,90	10.682,50	11.311,30
Singapura	5.390,700	7.068,60	7.824,20	8.990,40
Jepang	8.383,500	9.561,80	12.198,60	10.104,50
Uni Eropa	8.101,600	9.320,20	10.870,30	13.092,80
Total Pasar Ekspor Non Tradisional	25.791,400	30.969,90	38.013,60	46.643,80
Cina	3.437,400	3.959,80	5.466,60	6.664,10
India	2.115,200	2.865,40	3.326,50	7.787,10
Korea Selatan	1.846,000	2.595,40	3.414,60	4.885,00
Malaysia	2.870,100	3.309,60	3.789,60	7.060,80
Lainnya	15.522,700	18.239,70	22.016,30	31.989,30
Pangsa Pasar (%)				
Dunia	100	100	100	100
Total Pasar Ekspor Tradisional	53,90	53,4	52,2	49,3
Amerika	14,80	14,3	13,4	12,3
Singapura	9,60	10,6	9,8	9,8
Jepang	15,0	14,4	15,3	14,2
Uni Eropa	14,50	14	13,7	13
Total Pasar Ekspor Non Tradisional	46,10	46,6	47,8	50,7
Cina	6,10	6	6,9	7,2
India	3,80	4,3	4,2	5,3
Korea Selatan	3,30	3,9	4,3	4,1
Malaysia	5,10	5	4,8	5
Lainnya	27,70	27,5	27,7	29,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan: *) Angka Januari 2004 - Juni 2007

Jika dilihat dari tabel tersebut, penurunan pangsa ekspor tradisional tiap tahunnya dari negara-negara lain seperti Amerika, Singapura, Jepang, dan Uni Eropa cukup mempengaruhi total pangsa ekspor tradisional secara keseluruhan. Seperti pada tahun 2004, total pangsa ekspor tradisional sebesar 14,8% kemudian turun pada 2005 hingga 14,3% begitu juga pada tahun berikutnya. Kemudian disusul pula oleh Jepang yang pada tahun 2004 dengan total 15% turun menjadi 14,4% begitu pula pada tahun selanjutnya.

Dari hasil survey oleh *World Competitiveness Report* pada tahun 2001 menggambarkan daya saing negara Indonesia yang masih dibilang cukup rendah. *World Economic Forum* (WEF) juga menyebutkan bahwa diantara 75 negara, Indonesia berada di angka 64 Indeks Daya Saing Pertumbuhan (*Growth Competitiveness Index/GCI*). Sampai sejauh ini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi ekonomi secara global masih sangat tertinggal dengan negara lain. Dari kesigapan dan antisipasi Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan negara berkembang lainnya. Berdasarkan Indeks daya saing terkini, Indonesia berada di peringkat 55. Jika dibandingkan dengan enam negara di lingkup ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke 6 dalam GCT dan peringkat 5 untuk CCI pada tahun 2001.

Kerjasama bilateral dan regional berdampak pada Indonesia dengan penjelasan bahwa kerjasama ekonomi antara Jepang dan negara ASEAN lainnya berjumlah 4 negara, kemudian kerjasama ekonomi di antara Jepang dan negara anggota NAFTA, kemudian kerjasama Jepang dan Negara Singapura yang tentu saja merupakan partner dagang terbesar Indonesia saat ini, kerjasama antara Jepang, Singapura, Korea, Cina yang tentu saja termasuk Hongkong, dan

NAFTA, kemudian kerjasama antara negara-negara sebelumnya dengan AFTA dan APEC yang analisisnya diperoleh dengan menggunakan alat analisis *Computable General Equilibrium*.⁸⁷

Hasil simulasi menunjukkan bahwa jika tidak mengikuti perdagangan internasional dengan melakukan kerjasama ekonomi maka tidak akan mendapatkan keuntungan dan tidak saling menguntungkan. Masing-masing negara dipengaruhi oleh terjadinya diversifikasi perdagangan dan pengaruh yang secara bertahap dan sistematis pada akumulasi modal. Hal tersebut juga mendapatkan pengaruh dari *Free Trade Arrangements* (FTAs) atas pertumbuhan GDP. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu ekonomi membaik dengan kerjasama ekonomi antar negara.⁸⁸

Forum regional ataupun internasional seperti APEC, AFTA, dan WTO dapat menjadikan sebuah negara menjadi negara yang antisipatif dan negara yang respon terhadap kebijakan pasar global agar mampu bersaing dalam perdagangan internasional. liberalisasi dan perdagangan bebas dibarengi dengan banjirnya investasi, sebagai wujud pesatnya kemajuan teknologi dalam hal komunikasi antar bangsa. Di dalam wujud tren perdagangan bebas yang saat ini telah menjadikan suatu target pencapaian suatu negara terutama bagi negara yang maju atau negara dengan industri maju.

Liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan investasi yang berjalan bersama dengan semakin majunya pengetahuan dan teknologi serta sistem komunikasi antar bangsa-bangsa membuat setiap negara dituntut untuk tanggap

⁸⁷ Ibid. Hlm. 9

⁸⁸ Ibid.

atas berbagai situasi dan kondisi agar mampu untuk bersaing bersama-sama negara lainnya secara sistem untuk meningkatkan sebuah nilai. Baik dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya, baik dalam forum internasional maupun forum-forum regional. Untuk negara yang ekonominya lemah, perdagangan bebas akan menjadi sebuah ancaman yang perlahan-lahan masuk dengan segala bentuk kemudahan dan peluang akan majunya perekonomian namun dibalik hal tersebut adanya sebuah ancaman yang menunggu jika negara tersebut tidak mampu bersaing secara global maka pasar lokal akan terkikis habis oleh negara-negara maju. Mau tidak mau, negara yang terakhir harus berakhir dan ikut dalam arus perdagangan bebas tersebut.⁸⁹

Jika penulis boleh berpendapat, sebagai negara berkembang yang pernah mengalami krisis berbagai dimensi saat pada tahun 2005-2007, Jepang dan Indonesia adalah negara yang benar-benar berbeda dari segala sisi. Mulai dari sumber daya manusia, kemajuan teknologi, tingkat keantisipasi pemerintah, kualitas lembaga, dan ketepatan sangat tertinggal jauh dengan Jepang. Apakah Indonesia akan benar-benar siap dalam menghadapi kerjasama ini ? apakah Indonesia sanggup untuk bekerjasama dan mengambil keuntungan demi kepentingan negara dan memperoleh manfaat ? ataukah sebaliknya, Indonesia akan menjadi sasaran empuk bagi negara-negara lain yang ingin menguasai Indonesia melalui kegiatan perdagangan bebas ini.

⁸⁹ Ibid. Hlm 10

Dalam perjanjian ini, kedua Negara memiliki kepentingan masing-masing. Adapun kepentingan Indonesia adalah sebagai berikut :⁹⁰

1. Jepang merupakan mitra dagang Indonesia dan Jepang memberikan bantuan yang diberi nama *Official Development Assistance* (ODA) kepada Indonesia.
2. Akses pasar Indonesia menjadi lebih mudah karena termasuk impor dari Indonesia sebesar 13 persen sampai saat ini.
3. Jepang sebagai investor utama bagi Indonesia.
4. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil.

Oleh karena itu, IJEPA merupakan salah satu kerjasama yang cukup berpengaruh bagi Indonesia karena nilai investasi Jepang terbilang tinggi. Dengan besarnya investasi oleh Jepang di Indonesia dapat meningkatkan produksi dan membantu Indonesia memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Indonesia.

5.2.2. Faktor Strategis

Jepang dan Indonesia meskipun mempunyai sejarah buruk, namun Jepang berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut dan mencoba membantu untuk melakukan pembangunan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, hubungan ekonomi yang cukup dekat diperoleh dengan waktu yang lama pula selama puluhan tahun. Jepang merupakan negara sasaran Indonesia dalam ekspor dan impor terbesar bagi Indonesia. Jepang selalu menjadi investor tetap Indonesia dan terbesar sejak tahun 1967 hingga 2004 walaupun pemulihan ekonomi belum dilakukan secara maksimal dan belum tercapai sesuai

⁹⁰Fithra Faisal Hastiadi, *Impact Analysis of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement to Price-Cost Margins Indonesia's Manufacture Industry*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 15, No. 2 Januari 2015, hlm 1

yang diharapkan. Untuk ekspor Indonesia mencapai angka 19,06% dan untuk impor mencapai angka 13,07% dengan Jepang pada tahun 2004. Jepang juga menganggap bahwa Indonesia adalah suplier energi yang terbilang sangat penting.⁹¹

Jepang berinvestasi di Indonesia sebesar 19,47% dari total keseluruhan investasi asing di Indonesia. Tercatat sekitar 1000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan bagi empat ratus ribu tenaga kerja di Indonesia. Sebagai negara penyalur ODA terbesar, Jepang memiliki hubungan ekonomi yang sangat dekat dengan Indonesia dan hal tersebut tidak akan terjalin tanpa adanya kerjasama lanjutan sehingga kerjasama akan terus terarah dan saling menguntungkan.⁹²

Jepang telah menduduki peringkat pertama di angka 11,5% dari keseluruhan investasi Indonesia selama tahun 1957 hingga tahun 2007. Tidak kurang dari 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Dari banyaknya perusahaan tersebut juga memberikan lapangan pekerjaan bagi Indonesia nomor 1 dan memperkerjakan 32 ribu pekerja Indonesia.⁹³

Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia juga memiliki kepentingan yang menjadi faktor utama dalam mengambil langkah kerjasama dengan Jepang dalam IJEPA. Kepentingan Indonesia yang paling utama yaitu dalam bidang perdagangan. Sedangkan dalam perikanan juga tidak luput dalam sektor yang

⁹¹ “Japan- Indonesia Economic Partnership Agreement Joint Study Group Report”, (diakses pada 5 Juni 2019) <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>

⁹² Ibid.

⁹³ www.id.emb-japan.go.jp

akan dilakukan kerjasama karena dalam bidang perikanan Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor yang cukup penting bagi Jepang.⁹⁴

Dengan adanya IJEPA ini, Jepang juga meningkatkan investasinya di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dari sudut pandang pemikiran neoklasik, bahwa investasi yang dialirkan kepada suatu negara, akan dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya Indonesia yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi hanya terjadi apabila banyaknya investasi yang masuk. Dengan investasi akan mencapai dua hal berikut ini :

- a. Pendapatan upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat (*demand side*), dan
- b. Investasi yang akan menghasilkan barang atau jasa, selanjutnya akan dikirim ke pasar global yang akan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi nasional (*supply side*).⁹⁵

Indonesia merupakan mitra strategis bagi Jepang, tidak hanya dalam hal perikanan namun di Indonesia juga terdapat sekitar 16 ribu pelaku bisnis asal Jepang yang tinggal di Indonesia dan Indonesia sebagai basis produksi otomotif utama bagi Jepang.⁹⁶

⁹⁴ ” Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)”, (akses pada 5 Juni 2019), www.indonesia.go.id/id/index2.php?option=com_content...1...

⁹⁵ Ahmad Erani Ysutika, Ph.D , “Ekonomi Politik (kajian teoritis dan analisis empiris)”, Yogyakarta, 2009, hlm.224

⁹⁶ Akbar Nikmatullah Dachlan, Update Indonesia : Meraba Kembali IJEPA, Indonesia Untung atau Buntung, Volume IX, No. 03, 2015, hlm. 7

5.2.3. Event Driven

Event Driven berhubungan dengan perihal adanya percepatan perundingan atau negoisasi yang dibuat. Faktor ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu PTA, WTO access, dan Political.⁹⁷

Pembahasan mengenai PTA yang terdiri dari PTA facilitation, faktor ini berlaku apabila Indonesia berada di anggota PTA yang sama dengan negara Jepang dengan tujuan dapat bergabung dengan PTA tersebut. Namun, Jepang merupakan yang sama dengan Indonesia dalam kerjasama ASEAN-JEPANG. Sehingga dapat dikatakan apabila Indonesia menyetujui untuk melakukan perundingan dengan Jepang mengenai perjanjian bilateral untuk mendukung pula segala kerjasama tingkat regional antara Indonesia dan Jepang.⁹⁷

Kemudian mengenai WTO access, faktor ini dapat berlaku apabila Indonesia merupakan negara yang belum bergabung dengan WTO yang kemudian ingin membuat BTA dengan Jepang untuk dapat akses menjadi anggota WTO.⁹⁸ Indonesia dan Jepang adalah anggota WTO sejak 1 Januari 1995. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa faktor WTO access tidak menjadi faktor pendorong dalam pembentukan IJEPA.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dapat dijelaskan secara umum mengenai penyetujuan kerjasama perundingan Indonesia dengan Jepang dalam IJEPA terdapat faktor PTA dengan percepatan perundingan untuk memperlancar dan mendukung kerjasama antara Indonesia dan Jepang di tingkat regional.

⁹⁷ Menon, Jayant. Op.Cit

⁹⁸ Ibid.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang penulis sudah jelaskan di BAB sebelumnya, maka dapat disimpulkan faktor apa saja yang menjadi pendorong Indonesia membentuk perjanjian bilateral dengan Jepang dalam IJEPA. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor umum dan faktor spesifik.

Faktor umum yang dapat menjadi pendorong adalah adanya kekecewaan negara terhadap kegagalan liberalisasi perdagangan dalam institusi perdagangan multilateral, bentuk respon dari kegagalan liberalisasi perdagangan pada level multilateral berdampak kepada peningkatan jumlah *bilateral trade agreement* (BTA) termasuk Indonesia setelah adanya momen gagalnya kesepakatan WTO dalam liberalisasi perdagangan terutama pada putaran Doha di Seattle dan Cancun pada 2003 yang akhirnya berdampak pada dorongan Indonesia untuk melakukan perjanjian kerjasama BTA yang akhirnya melakukan BTA dengan negara Jepang.

Faktor umum yang kedua adalah adanya *Domino effect* di kawasan yang berkaitan dengan trend serta jumlah BTA yang ada di suatu kawasan sehingga memberikan suatu dilema kepada sebuah negara jika tidak mengikuti trend ini, karena adanya kekhawatiran kehilangan pasar maka sebagian besar negara akhirnya mengikuti trend yang ada dalam rangka mempertahankan pasar yang mereka punya. Dengan adanya trend BTA di kawasan Asia-pasifik yang

mempengaruhi suatu perilaku ataupun tindakan yang diambil oleh Indonesia dalam menentukan sebuah kebijakan dalam BTA yang dijalani Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang juga berusaha melakukan berbagai FTA untuk menunjang ekonomi negara dan mempererat hubungan dengan negara-negara lainnya seperti Selandia Baru, India, dan lain sebagainya.

Faktor umum yang ketiga bahwa BTA cenderung tidak terlalu menarik perhatian publik. Hal tersebut dikarenakan proses BTA yang bisa dibilang cukup panjang adanya beberapa kali negosiasi dengan negara yang bersangkutan dan dengan negosiasi tertutup sehingga perhatian media Indonesia tidak gencar.

Faktor umum yang keempat adalah motif politik, tidak dapat dilepaskan dalam perilaku dan sebuah keputusan yang diambil oleh sebuah negara, sehingga motif politik masuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan negara membentuk BTA dengan negara lain. Dengan kondisi politik luar negeri yang begitu bergejolak saat awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengalami krisis ekonomi serta kemampuan secara nasional untuk menghadapi krisis tampaknya cukup sulit ketika hal tersebut berdampak dalam penajaman konflik sosial dan politik, adanya gerakan terorisme internasional. Dengan melakukan perundingan dengan Jepang membuat hubungan diplomatik Indonesia semakin membaik. Arus politik yang saat itu sedang bergejolak karena adanya pemilihan umum tidak memberikan pengaruh kepada Jepang untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan mempercepat proses negosiasi dengan Jepang dapat meningkatkan keberhasilan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sektor ekonomi dengan target peningkatan konsumsi masyarakat dan kegiatan ekspor impor Indonesia dengan Jepang dengan rata-rata

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 mencapai 5,9 persen dan tumbuh pada tahun 2010 menjadi 6,1 persen.

Kemudian *specific factor*, diantara faktor ekonomi, faktor strategis, dan *event driven* yang paling menonjol adalah faktor ekonomi. Dari ketiga faktor tersebut faktor ekonomi lebih dominan karena gejolak perekonomian Indonesia yang mengalami fluktuatif membuat Indonesia melakukan agenda-agenda besar termasuk penyetujuan berbagai kerjasama di bidang ekonomi seperti IJEPA untuk penghapusan hambatan-hambatan perdagangan yang sampai saat ini masih berlaku. Faktor strategi dan event driven juga menjadi faktor pendorong, namun, tidak menjadi faktor yang dominan karena IJEPA fokus terhadap *Economic Partnership*.

Di dalam wujud tren perdagangan bebas yang saat ini telah menjadikan suatu target pencapaian suatu negara terutama bagi negara yang maju atau negara dengan industri maju. Liberalisasi perdagangan dan pertumbuhan investasi yang berjalan bersama dengan semakin majunya pengetahuan dan teknologi serta sistem komunikasi antar bangsa-bangsa membuat setiap negara dituntut untuk tanggap atas berbagai situasi dan kondisi agar mampu untuk bersaing bersama-sama negara lainnya secara sistem untuk meningkatkan sebuah nilai. Baik dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya, baik dalam forum internasional maupun forum-forum regional. Untuk negara yang ekonominya lemah, perdagangan bebas akan menjadi sebuah ancaman yang perlahan-lahan masuk dengan segala bentuk kemudahan dan peluang akan majunya perekonomian namun dibalik hal tersebut adanya sebuah ancaman yang menunggu jika negara tersebut tidak mampu bersaing secara global maka pasar lokal akan terkikis habis

oleh negara-negara maju. Mau tidak mau, negara yang terakhir harus berakhir dan ikut dalam arus perdagangan bebas tersebut.

Menurut pendapat penulis bahwa konsep *Bilateral Trade Agreement* yang ditulis oleh Jayant Menon masih sangat relevan dan sesuai digunakan dalam menjelaskan faktor yang mendorong suatu negara dalam membentuk BTA dengan negara lain. penjelasan variabel dan indikator yang digunakan dalam membagi dan memetakan secara menyeluruh baik melalui aspek yang umum hingga ke aspek yang lebih khusus. Sehingga kesimpulan yang didapat bisa menjadi acuan mengenai alasan sebuah negara membentuk BTA serta faktor apa yang dapat menjadi dominan dapat dilihat melalui perbandingan hasil yang ditemukan.

6.2. Saran

Di dalam penelitian ini penulis mencari fakta mengenai faktor pendorong sebuah negara melakukan BTA dengan negara lain menurut konsep BTA, yang dalam hal ini adalah negara Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Jepang dalam IJEPA. Sehingga penulis tidak membahas mengenai dampak pelaksanaan IJEPA sejak diberlakukan tahun 2008 hingga saat ini. Untuk penelitian selanjutnya penulis memberikan rekomendasi mengenai beberapa isu penelitian yang dapat dibahas secara mendalam mengenai perjanjian IJEPA salah satunya adalah dampak peningkatan secara ekonomi saat berlakunya IJEPA di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat Atmawinata, “*Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat*”, Jakarta, Desember 2007
- _____, “*Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global: Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi Midec- Ijepa*”, Jakarta, Desember 2008
- Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership*, www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements, diunggah pada tanggal 10 April 2019 pukul 07.15 WIB
- Amstutz Mark R, *International Conflict and Cooperation An Introduction To World Politics*, 1995 (USA: C. Brown Communication Inc), hlm. 74
- Analisis *Review IJEPA Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan*, 2015
- Betha Landes K.S., *Manfaat Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) (Manfaat Ekspor Komoditi Non-Migas Indonesia ke Jepang)*, Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fithra Faisal Hastiadi, *Impact Analysis of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement to Price-Cost Margins Indonesia's Manufacture Industry*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 15, No. 2 Januari 2015
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004

- Holsti, K., 1988, *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisa*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga
- Kartasasmita Ginanjar, 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM
- Kementerian Luar Negeri RI, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, *Assesments dan Kompilasi Free Trade Agreement*, Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, 2010
- Menon, Jayant. 2007. *Bilateral trade agreement. Journal compilation 2007 Crawford School of Economics and Government*, the Astralian national University and Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Plano, Jack C. dan Olton, Roy. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Putra A. Bardin, hlm. 176
- Purwanto dan Sulistyastuti , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991
- Septika Tri, *Dampak Perjanjian Perdagangan Internasional Indonesia-Jepang(IJEPA) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral*, 2015, Kementerian Perdagangan RI
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017, Yogyakarta: Alfabeta

Susana Puspa Dewi, "Kerjasama IJEPa Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Perdagangan Indonesia-Jepang", skripsi FISIP HI Unpas, 2013

Syamsul Hadi dan Shamti Darmastuti, 2009. *Dominasi Modal Jepang di Indonesia Telaah Kritis atas Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Indonesia-Jepang* (Jakarta: Institute for Global Justice)

Syntia Devi Larasati, *Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement terhadap Evaluasi Kebijakan Terhadap Eksploitasi Ikan Tuna di Perairan Indonesia*, *Journal of International*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015

T.,Walmsley and K. Itakura, 2001, *Dynamic effects of the "New Age" Free Trade Agreement between Japan and Singapore*, Vol. 16, No. 4, *Journal of Economic Integration*, Sejong University.

